

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2024 - 2026



BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Jl. KH. Wachid Hasyim No. 2 Karanganyar
✉ bkd@karanganyarkab.go.id



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, mengamanatkan agar Bupati memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 yang ditetapkan oleh kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah transisi bagi daerah dengan masa jabatan Bupati yang berakhir pada tahun 2023, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dan/atau sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2024-2026 pada Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman untuk penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 hingga Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024-2026

Pasal 4

Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

Pasal 5

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut :

- a. Lampiran I Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024-2026;
- b. Lampiran II Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026;
- c. Lampiran III Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024-2026;
- d. Lampiran IV Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026;
- e. Lampiran V Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2026;
- f. Lampiran VI Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2024-2026;
- g. Lampiran VII Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024-2026;
- h. Lampiran VIII Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2024-2026;
- i. Lampiran IX Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026;
- j. Lampiran X Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026;
- k. Lampiran XI Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024-2026;
- l. Lampiran XII Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026;

- m. Lampiran XIII Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026;
- n. Lampiran XIV Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024-2026;
- o. Lampiran XV Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024-2026;
- p. Lampiran XVI Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026;
- q. Lampiran XVII Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2024-2026;
- r. Lampiran XVIII Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2024-2026;
- s. Lampiran XIX Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026;
- t. Lampiran XX Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024-2026;
- u. Lampiran XXI Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024-2026;
- v. Lampiran XXII Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2024-2026;
- w. Lampiran XXIII Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024-2026;
- x. Lampiran XXIV Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026;
- y. Lampiran XXV Rencana Strategis Kecamatan Jatipuro Tahun 2024-2026;
- z. Lampiran XXVI Rencana Strategis Kecamatan Jatiyoso Tahun 2024-2026;
- aa. Lampiran XXVII Rencana Strategis Kecamatan Jumantono Tahun 2024-2026;
- bb. Lampiran XXVIII Rencana Strategis Kecamatan Jumapolo Tahun 2024-2026;
- cc. Lampiran XXIX Rencana Strategis Kecamatan Matesih Tahun 2024-2026;
- dd. Lampiran XXX Rencana Strategis Kecamatan Tawangmangu Tahun 2024-2026;
- ee. Lampiran XXXI Rencana Strategis Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024-2026;
- ff. Lampiran XXXII Rencana Strategis Kecamatan Karangpandan Tahun 2024-2026;
- gg. Lampiran XXXIII Rencana Strategis Kecamatan Karanganyar Tahun 2024-2026;
- hh. Lampiran XXXIV Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024-2026;
- ii. Lampiran XXXV Rencana Strategis Kecamatan Jaten Tahun 2024-2026;
- jj. Lampiran XXXVI Rencana Strategis Kecamatan Colomadu Tahun 2024-2026;
- kk. Lampiran XXXVII Rencana Strategis Kecamatan Gondangrejo Tahun 2024-2026,

- ll. Lampiran ,XXXVII' Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang Tahun 2024-2026;
 - mm. Lampiran XXXIX Rencana Strategis Kecamatan Kebakkramat Tahun 2024-2026;
 - nn. Lampiran XL Rencana Strategis Kecamatan Kerjo Tahun 2024-2026;
 - oo. Lampiran XLI Rencana Strategis Kecamatan Jenawi Tahun 2024-2026; dan
 - pp. Lampiran XLII Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 19 April 2023

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 19 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 16



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

METTY FERRISKA R.
NIP 19760417 199903 2 007

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI
KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024-2026



RENCANA STRATEGIS
BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2024-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yang disusun dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, Rencana Strategis Kementerian terkait dan Rencana Strategis Badan terkait di Provinsi Jawa Tengah.

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar memuat tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis, indikator sasaran, rencana program, indikator program, rencana kegiatan, indikator kegiatan, rencana sub kegiatan, indikator sub kegiatan, kebijakan, serta anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil/kinerja. Berkenaan dengan hal tersebut dalam memenuhi dokumen perencanaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, maka disusunlah Dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan kebutuhan program, kegiatan dan anggaran Tahun 2024-2026 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

Karanganyar, April 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR


KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700510 199003 1 006

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Dasar Hukum Penulisan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Sistematika Penulisan	3
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) KABUPATEN KARANGANYAR.	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.	
2.1.1 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar	6
2.2 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.....	13
2.2 Sumber Daya Manusia Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.....	20
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar	66
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.....	 67

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.....	67
3.2 Telaah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah	71
3.3Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.	
3.3.1 Telaahan RT RW.	
3.3.2 Telaahan KLHS	75
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	75
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan	77
4.2 Sasaran	77
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi.....	83
5.2 Arah Kebijakan.....	88
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
91	
BAB VII INDIKATOR KINERJA BADAN KEUANGAN DAERAH	
107	
BAB VIII PENUTUP	
112	
8.1 Pedoman Transisi	112
8.2 Kaidah Pelaksanaan Perubahan Renstra	113

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah.....15

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah.....15

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah.....16

Tabel 2. 4 Rekapitulasi Sarana Prasarana.....17

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah
Tahun 2019-2020 Kabupaten Karanganyar21

Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah
Tahun 2021-2022 Kabupaten Karanganyar31

Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan
Keuangan Daerah Tahun 2019-2020 Kabupaten Karanganyar40

Tabel 2. 8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan
Keuangan Daerah Tahun 2021-2022 Kabupaten Karanganyar61

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah68

Tabel 3. 2 Telaah Tujuan dan Sasaran OPD Beserta Faktor
Penghambat Dan Pendorong.....73

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKD
Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-202678

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....84

Tabel 6. 1 Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja
Utama Badan Keuangan Daerah.....92

Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar.....110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.....14

Gambar 5. 1 Keterkaitan Sasaran dengan Strategi.....84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dengan visi **"Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar"** akan berakhir masa berlakunya di tahun 2023, telah habisnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar berakhir pada tahun 2023 sehingga Daerah memerlukan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai penggantinya. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dimana Pemerintah Daerah yang masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2023 untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah kabupaten dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD kabupaten Tahun 2024-2026. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu Perangkat Daerah juga wajib Menyusun Renstra Tahun 2024-2026. Renstra Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah, permasalahan dan isu strategis yang dihadapi, potensi dan kewenangan yang dimiliki, kemampuan pendanaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut diatas Renstra Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar disusun dengan memperhatikan tujuan, sasaran daerah, indikator dan target kinerja daerah, serta kemampuan dana daerah.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Namun di era

Reformasi Birokrasi peran dan kinerja suatu Perangkat Daerah sangat diperlukan, karena jalannya Pemerintahan akan baik jika setiap OPD dapat saling sinergis dan kolaboratif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Renstra akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Selain itu, juga menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan Perangkat Daerah selama tiga tahun kedepan. Setelah melaksanakan kegiatan maka sebagai Perangkat Daerah setiap tahun wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. DASAR HUKUM PENULISAN

Dasar hukum penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah :

- 1) Sebagai dokumen dasar/ acuan penyusunan kebijakan 3 (tiga) tahun Badan Keuangan Daerah untuk mendukung terwujudnya indikator kinerja dari sasaran strategis Badan Keuangan Daerah;
- 2) Sebagai pedoman dalam merumuskan program dan kegiatan berserta kerangka kebutuhan pendanaan pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- 3) Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar;
- 4) Sebagai pedoman dan alat kendali kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka evaluasi atas kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah terhadap pencapaian target indikator kinerja setiap tahun dalam kurun tahun 2024-2026;
- 5) Sebagai bahan evaluasi meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Keuangan Daerah pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 6) Menganalisa, mengetahui menyusun rencana strategis, serta mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan Perangkat Daerah

Adapun tujuannya untuk terwujudnya dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah yang obyektif, realistis, implementatif dan dapat digunakan untuk mengukur kinerja Perangkat Daerah. Dokumen ini akan digunakan setiap pimpinan instansi/ unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/ unit kerja. Sehingga terwujudnya tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan latar belakang yang menjelaskan alasan penyusunan, dasar hukum yang terkait dengan renstra, maksud dan tujuan penulisan renstra serta sistematika penulisan dari Bab I sampai Bab VIII, yang masing-masing terinci dalam subbab.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini diuraikan gambaran umum Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar terkait tugas, fungsi dan struktur organisasi, ketersediaan sumberdaya baik manusia maupun sarana prasarana, hasil kinerja selama 5 tahun, kegiatan layanan yang

dilaksanakan dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan (Bupati, Provinsi dan atau Pemerintah Pusat).

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan permasalahan, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelayanan Perangkat Daerah, tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan yang didasarkan pada data dan informasi yang diuraikan dalam Bab II. Permasalahan-permasalahan dipilih dan dirumuskan menjadi isu strategis yang menjadi prioritas untuk diselesaikan, dalam kurun waktu perencanaan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar sebagai perangkat daerah yang mendukung tercapainya sasaran daerah, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pusat sesuai kewenangan yang ditangani Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar. Perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang disertai dengan ukuran (indikator) dan target yang ditetapkan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan rincian program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja indikator, target / volume serta pagunya (sesuai permendagri / pemuthakiran).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Bab ini memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan urusan

keuangan melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKK)

BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas kaidah pelaksanaan dan pedoman penggunaannya di masa transisi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD)
KABUPATEN KARANGANYAR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar

2.1.1 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah:

- a. Menyusun kebijakan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta kesekretariatan;
- b. Mengkoordinasikan fasilitas dan pembinaan kegiatan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta kesekretariatan;
- c. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta kesekretariatan.

Sedangkan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar yang terdiri dari :

1. Kepala Badan

a. Tugas Kepala Badan

Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.

b. Fungsi Kepala Badan

- 1) Penyusunan Kebijakan teknis bidang keuangan Daerah;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang keuangan Daerah;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan pemerintahan bidang keuangan Daerah;
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, yang merupakan unsur pembantu Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

a. Tugas Sekretaris

Seorang Sekretaris mempunyai tugas melakukan perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

b. Fungsi Sekretaris

- 1) Pengkoordinasian kegiatan;
- 2) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan, dan kepegawaian.

- 4) Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- 5) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- 6) Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 9) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum.

3. Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan, dan Penetapan

Bidang Pendataan, Pengolahan, dan Penetapan merupakan pelaksana unsur penunjang di bidang pendataan, pengolahan, dan penetapan pendapatan yang dipimpin oleh Kepala Bidang, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

a. Tugas Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan, dan Penetapan

Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan, dan Penetapan mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan di bidang pendataan, pengolahan, dan penetapan pendapatan.

b. Fungsi Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan, dan Penetapan

- 1) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendaftaran, pendataan, pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi, dan penetapan pendapatan;

- 2) Pelaksanaan program kerja bidang pendaftaran, pendataan, pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi, dan penetapan pendapatan;
- 3) Pengelolaan program kerja bidang pendaftaran, pendataan, pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi, dan penetapan pendapatan;
- 4) Pengkoordinasian bidang pendaftaran, pendataan, pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi, dan penetapan pendapatan;
- 5) Pemantauan dan pengendalian di bidang pendaftaran, pendataan, pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi, dan penetapan pendapatan;
- 6) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan; dan
- b. Sub Bidang Pengolahan Data Intensifikasi dan ekstensifikasi.

4. Kepala Bidang Penagihan, Keberatan, dan Pemeriksaan Pajak

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak merupakan pelaksana unsur penunjang di bidang penagihan, keberatan, dan pemeriksaan pajak dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

a. Tugas Kepala Bidang Penagihan, Keberatan, dan Pemeriksaan Pajak

Kepala Bidang Penagihan, Keberatan, dan Pemeriksaan Pajak mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penagihan, keberatan, dan pemeriksaan pajak.

b. Fungsi Kepala Bidang Penagihan, Keberatan, Banding, dan Pemeriksaan Pajak

- 1) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penagihan, keberatan, banding, dan pemeriksaan pajak;
- 2) Pelaksanaan program kerja bidang penagihan, keberatan, banding, dan pemeriksaan pajak;

- 3) Pengelolaan program kerja bidang penagihan, keberatan, banding, dan pemeriksaan pajak;
- 4) Pengkoordinasian penagihan, keberatan, banding, dan pemeriksaan pajak;
- 5) Pemantauan dan pengendalian bidang penagihan, keberatan, banding, dan pemeriksaan pajak;
- 6) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak terdiri dari:

- a. Sub Bidang Penagihan; dan
- b. Sub Bidang Keberatan dan Banding.

5. Kepala Bidang Anggaran

Bidang Anggaran merupakan pelaksana unsur penunjang di bidang anggaran, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

a. Tugas Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran.

b. Fungsi Kepala Bidang Anggaran

- 1) Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan, dan pengendalian anggaran keuangan daerah;
- 2) Penyusunan program kerja perencanaan, penyusunan, dan pengendalian anggaran keuangan daerah;
- 3) Pengelolaan program kerja perencanaan, penyusunan, dan pengendalian anggaran keuangan daerah;
- 4) Pengkoordinasian perencanaan, penyusunan, dan pengendalian anggaran keuangan daerah;
- 5) Pemantauan dan pengendalian perencanaan, penyusunan, dan pengendalian anggaran keuangan daerah;
- 6) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Anggaran terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
- b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.

6. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah merupakan pelaksana unsur penunjang di bidang perbendaharaan dan kas daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

a. Tugas Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas perencanaan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perbendaharaan dan kas daerah

b. Fungsi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

- 1) Pelaksanaan kebijakan teknis perbendaharaan dan kas keuangan daerah;
- 2) Pelaksanaan program kerja perbendaharaan dan kas keuangan daerah;
- 3) Pengelolaan program kerja perbendaharaan dan kas keuangan daerah;
- 4) Pengkoordinasian perbendaharaan dan kas keuangan daerah;
- 5) Pemantauan dan pengendalian perbendaharaan dan kas keuangan daerah;
- 6) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
- b. Sub Bidang Kas Daerah.

7. Kepala Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi merupakan pelaksana unsur penunjang di bidang pengelolaan akuntansi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

a. Tugas Kepala Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas perencanaan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan akuntansi keuangan.

b. Fungsi Kepala Bidang Akuntansi

- 1) Pelaksana kebijakan teknis pengelolaan akuntansi keuangan;
- 2) Penyusunan program kerja pengelolaan akuntansi keuangan;
- 3) Pengelolaan program kerja pengelolaan akuntansi keuangan;
- 4) Pengkoordinasi pengelolaan akuntansi keuangan;
- 5) Pemantauan dan pengendalian pengelolaan akuntansi keuangan; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pembukuan; dan
- b. Sub Bidang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan.

8. Kepala Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah merupakan pelaksana unsur penunjang di bidang pengelolaan aset daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

a. Tugas Kepala Bidang Aset Daerah

Kepala Bidang Aset Daerah mempunyai tugas perencanaan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan aset daerah.

b. Fungsi Kepala Bidang Aset Daerah

- 1) Penyusunan program kerja bidang pengelolaan aset daerah;
- 2) Pelaksana kebijakan teknis bidang pengelolaan aset daerah;

- 3) Pengkoordinasi perencanaan bidang pengelolaan aset daerah;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan aset daerah; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Aset Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pendataan Aset Daerah; dan
- b. Sub Bidang Pemanfaatan Pengamanan Aset Daerah.

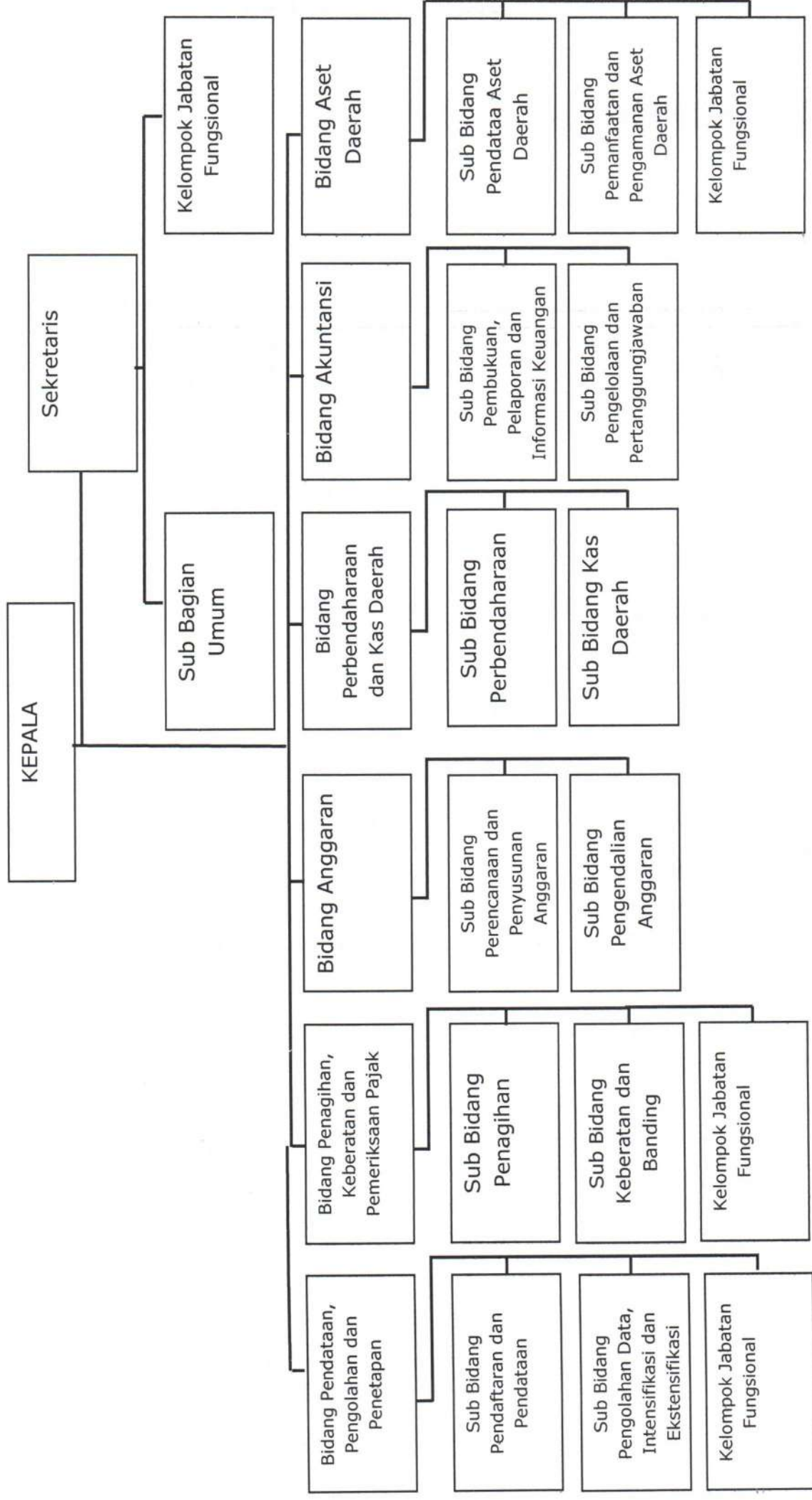
10. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

2.2 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar

Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar



2.2 Sumber Daya Manusia Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar

Sumber Daya Manusia Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar meliputi :

- 1. Kepegawaian
 - a. Berdasarkan Penugasan

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah Berdasarkan Penugasan

NO	PENUGASAN	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	14
3	Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan	13
4	Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak	8
5	Bidang Anggaran	7
6	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	9
7	Bidang Akuntansi	6
8	Bidang Aset Daerah	10
Jumlah		67

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2023

- b. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	IJAZAH/PENDIDIKAN	Laki-Laki	Perempuan	JUMLAH
1	S3 (Doktor)	-	-	-
2	S2 (Pasca Sarjana)	11	10	21
3	S1 (Sarjana)	17	12	29
4	D3 (Sarjana Muda)	4	3	7
5	SLTA / SMU / SMK	7	2	9
6	SMP	-	-	-
7	SD	1	-	1

Jumlah	40	27	67
--------	----	----	----

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2023

c. Pangkat/Golongan Ruang Gaji

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan Pangkat/Golongan			
Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
IV	9	4	13
III	22	24	46
II	5	2	7
I	1	-	1
Jumlah	37	30	67

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2023

d. Tenaga Kontrak

Dalam melaksanakan tugasnya BKD Kabupaten Karanganyar mengangkat tenaga kontrak sebanyak 250 orang.

Tabel 2. 4 Rekapitulasi Sarana Prasarana
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar

No	Nama	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	AC Unit	51		51
2	AC Split	18		18
3	Acces Point	12		12
4	Alat Kantor Lainnya	4		4
5	Alat Komunikasi Sosial Lainnya	11		11
6	Alat Pembersih lainnya	4		4
7	Alat Komunikasi Telp Lainnya	1		1
8	Alat Pemadam Lainnya	1		1
9	Alat Pemadam Portable	2		2
10	Alat Penghancur Kertas	7		7
11	Alat Penyimpanan Lainnya	3		3
12	Alat Rumah Tangga Lainnya	12		12
13	Alat Ukur Lainnya	4		4
14	Almari Besi/Metal	53		53
15	Amplifier	1		1
16	Bangku Tunggu	20		20
17	Brandkas	5		5
18	Camera Film	2		2
19	Camera Video	1		1
20	Camera+Attachment	12		12
21	Card Wirelaess LAN	1		1
22	Cassete Recorder	2		2
23	Daun Pintu Alminium	1		1
24	Daun Pintu Alminium	1		1
25	Disk Pack	1		1
26	Dispay	2		2
27	Dispencer	9		9
28	Exhauster Fan	3		3
29	External	1		1
30	Facsimile	1		1
31	Filling Besi/Metal	37		37
32	Gergaji	2		2
33	Gerobak Dorong	8		8
34	Global Postioning System	6		6
35	Handy Cam	4		4
36	Harddisk	15		15
37	Hiasan Dinding	45		45
38	Internet	1		1

39	Hub.	8		8
40	Jam Elecktronik	9		9
41	Karpet	4		4
42	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya	3		3
43	Keyboard	127		127
44	Kipás Angin	3		3
45	Kompor Gas	1		1
46	Kitchen Set	1		1
47	Korden	1		1
48	Komputer Unit /Jaringan Lainnya	1		1
49	Kursi Besi / Metal	109		109
50	Kursi biasa	177		177
51	Kursi Kayu / Rotan	6		6
52	Kursi Kerja Pejabat	28		28
53	Kursi Putar	19		19
54	Kursi Rapat	56		56
55	Kursi Rapat Pejabat	7		7
56	Kursi Tamu	25		25
57	Lap Top	30		30
58	Lemari & arsip Pejabat Lainnya	4		4
59	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	8		8
60	Lemari Buku untuk Perpustakaan	3		3
61	Lemari Es	2		2
62	Lemari Kaca	6		6
63	Lemari Kayu	26		26
64	Loudspeker	3		3
65	Lensa Kamera	3		3
66	M.Penghisap Debu	4		4
67	M.Potong Rumput	1		1
68	Mainframe	1		1
69	Megaphone	4		4
70	Meja 1/2 Biro	9		9
71	Meja Kayu /Rotan	22		22
72	Meja Kerja Pejabat	30		30
73	Meja Kerja Pejabat Eselon Ii	1		1
74	Meja Kerja Pejabat Eselon Iii	4		4
75	Meja Kerja Pejabat Eselon Iv	13		13
76	Meja Panjang	4		4
77	Meja Komputer	15		15
78	Meja Rapat	71		71
79	Meja Resepsionis	1		1
80	Meja Tambahan	4	5	9

81	Meja Telepon	5		5
82	Meja Tulis	0		0
83	Mesin Absensi	2		2
84	Mesin Cuci	1		1
85	Mesin Foto Copy Uk.Folio	1		1
86	Mesin Foto Copy K.Biasa	1		1
87	Mesin Hitung Manual		6	6
88	Mesin Kalkulator	3		3
89	Mesin Tik Man (11-13)	1		1
90	Mesin Tik Listrik Standrt	1		1
91	Mesin Tik Lainnya	2		2
92	Meubelair Lainnya	4		4
93	Microphone	34		34
94	Mimbar / Podium	1		1
95	Mini Komputer	6		6
96	Modem	5		5
97	Note Book	18		18
98	Monitor	8		8
99	Overhead Projector	0		0
100	P.C. Unit	127		127
101	Papan Nama Instansi	1		1
102	Peralatan Mini komputer Lainnya	4		4
103	Peralatan Jaringan Lainnya	1		1
104	Peralatan Personal Komp. Lainnya	20		20
105	Peralatan Studio Visual	10		10
106	Perkakas Kantor	2		2
107	Perforator Besar	1		1
108	Pick Up	1		1
109	Personal Komputer Lainnya	9		9
110	Pompa Air	1		1
111	Plotter	1		1
112	Portable Generating Set	1		1
113	Printer	131		131
114	Proyektor+Attachment	8		8
115	Rak Besi / Metal	41		41
116	Rotary Filling	2		2
117	Rak TV	1		1
118	Scanner	10		10
119	Senter	0		0
120	Sepeda Motor	54		54
121	Sepeda Motor Gerobak	0		0
122	Server	6		6

123	Sketsel / Penyekat	1		1
124	Software	2		2
125	Sound System	2		2
126	Speaker	3		3
127	Station Wagon	16		16
128	Stabilizer	1		1
129	Televisi	24		24
130	Tangga Almunium	2		2
131	Tustel	1		1
132	Timbangan Barang		1	1
133	Ware Less	1		1
134	Unit Power Supply	46		46

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2023

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Karanganyar

Badan Keuangan Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang melaksanakan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan barang daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang daerah Kabupaten Karanganyar. Sebagaimana telah dibahas pada sub bab di atas, Badan Keuangan Daerah sebagai OPD yang menyelenggarakan pelayanan sesuai urusan pemerintahan dan tugas pokok dan fungsi,yang ditangani adalah pelayanan pada sektor pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.

Analisis kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah selama periode Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 dilakukan dengan mengukur capaianIndikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, dan hasil yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah
Tahun 2019-2020
Kabupaten Karanganyar

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET		REALISASI	
			2019	2020	2019	2020
5	6	7	8	9	10	11
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	100%	100%	100%
Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana		100%	100%	100%	100%
pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional	3 Kendaraan Dinas	3 Kendaraan Dinas	3 Kendaraan Dinas	3 Kendaraan Dinas	3 Kendaraan Dinas
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET		REALISASI	
			2019	2020	2019	2020
5	6	7	8	9	10	11
Pengadaan Komputer	Jumlah pengadaan komputer	7 Set Komputer	7 Set Komputer	7 Set Komputer	7 Set Komputer	7 Set Komputer
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	14 Kendaraan Dinas	15 Kendaraan Dinas	14 Kendaraan Dinas	14 Kendaraan Dinas	14 Kendaraan Dinas
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	100%	100%	100%
Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kinerja aparatur	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Peningkatan SDM	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Tertip Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		100%	100%	100%	100%
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan penatausahaan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedianya buku laporan keuangan semesteran	43 OPD	43 OPD	43 OPD	43 OPD	43 OPD

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET		REALISASI	
			2019	2020	2019	2020
5	6	7	8	9	10	11
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terwujudnya administrasi keuangan yang baik	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
Pengembangan Sistem Akuntansi	Terlaksananya pengembangan SDM dan pengembangan akuntansi keuangan	43 OPD, Puskemas, UPT, SLTP	43 OPD, Puskemas, UPT, SLTP	18 OPD, 5 UPT Dinkes, 15 SLTP dan 4 Koordinator Kec/UP T Dikbud	18 OPD, 5 UPT Dinkes, 15 SLTP dan 4 Koordinator or Kec/UP T Dikbud	18 OPD, 5 UPT Dinkes, 15 SLTP dan 4 Koordinator Kec/UP T Dikbud
Asistensi Pengelolaan SDM Keuangan Daerah	Tertib administrasi keuangan daerah	43 OPD, Puskemas, UPT, SLTP	9 OPD	18 OPD, 5 UPT Dinkes, 15 SLTP dan 4 Koordinator Kec/UP T Dikbud	18 OPD, 5 UPT Dinkes, 15 SLTP dan 4 Koordinator or Kec/UP T Dikbud	18 OPD, 5 UPT Dinkes, 15 SLTP dan 4 Koordinator Kec/UP T Dikbud
Penyusunan Renstra OPD	Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis BKD Tahun 2019-2023	-	1 Buku	0	0	0
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	Cakupan Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah		100%	100%	100%	100%
Penyusunan / Penyempurnaan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya buku Perbub Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Perbub kebijakan akuntansi dan Perbub SAPD	250 OPD, PUSKESMAS, SLTP	Perbub kebijakan akuntansi dan Perbub SAPD	Perbub kebijakan akuntansi dan Perbub SAPD	Perbub kebijakan akuntansi dan Perbub SAPD
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya pengelolaan keuangan yang sistematis dan akuntabel	1 Perbub	1 Perbub	200 buku	200 buku	200 buku

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET		REALISASI	
			2019	2020	2019	2020
5	6	7	8	9	10	11
Penerbitan dan Verifikasi SPD	Tersedianya surat penyedia dana (SPD)	61 SKPD	61 SKPD	61 SKPD	61 SKPD	61 SKPD
Fasilitasi Pengelolaan Sistem Pendapatan Daerah	Terwujudnya sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah yang memadai	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Pemutakhiran data obyek dan subyek pajak daerah	Terlaksananya pemutakhiran Data Objek dan Subjek Subyek pajak daerah	8 pajak daerah	8 pajak daerah	8 pajak daerah	8 pajak daerah	8 pajak daerah
Pengelolaan BPHTB	Terlaksananya pengelolaan PD	100%	100%	15.603.000	15.603.000	15.603.000
Pemeliharaan Sarana Reklame	Pemeliharaan Sarana Reklame dengan baik	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Adminstrasi Pengelolaan Kas Daerah dan Deposito	Terwujudnya pengelolaan kas daerah dan deposito yang akuntabel	Laporan Posis Kas Daerah setiap Tahun	1 Tahun	12 kali	12 kali	12 kali
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase laporan keuangan OPD lengkap dan tepat waktu	900 Buku	900 Buku	90%	90%	90%
Penyusunan laporan data gaji Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya cetak daftar gaji PNS se Kabupaten	10835 pegawai / 1 Tahun	10835 pegawai / 1 Tahun	10.835 PNS	10.835 PNS	10.835 PNS
Administrasi Penertiban dan Pengelolaan SP2D	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan Tahun 2019	61 SKPD	61 SKPD	61 SKPD	61 SKPD	61 SKPD
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Pajak	Terwujudnya administrasi tentang piutang PBB yang tertib dan akuntabel	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET		REALISASI	
			2019	2020	2019	2020
5	6	7	8	9	10	11
Evaluasi dan Pelaporan Dana Pusat dan Daerah	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan dana pusat dan daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Administrasi komputerisasi gaji dan pencetakan daftar gaji	Terwujudnya penggajian yang tepat akurat dan cermat	Daftar Gaji 61 SKPD	61 SKPD	61 SKPD	61 SKPD	61 SKPD
Pemeliharaan Basis data Obyek dan subyek PBB	Terwujudnya akurasi data obyek dan subyek pajak PBB	1000 Wajib Pajak PBB P-2	1000 Wajib Pajak PBB P-2	700 WP	700 WP	700 WP
Pembinaan wilayah pungutan PBB	Terwujudnya optimalisasi penerimaan PBB	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan
Rekonsiliasi data Akuntansi Keuangan dan Non Keuangan	Tertib administrasi data keuangan	43 OPD, Puskemas, UPT, SLTP	43 OPD, Puskemas, UPT, SLTP	43 OPD, 5 UPT Dinkes, 15 SLTP dan 4 Koordinator Kec/UP T Dikbud	43 OPD, 5 UPT Dinkes, 15 SLTP dan 4 Koordinator or Kec/UPT Dikbud	43 OPD, 5 UPT Dinkes, 15 SLTP dan 4 Koordinator Kec/UPT Dikbud
Percepatan pemasukan pajak daerah	Terpenuhinya target pemasukan pajak daerah tahun 2019	405.000 Wajib Pajak	405.000 Wajib Pajak	410.000 WP	410.000 WP	410.000 WP
Pengembangan Sistem E-Government Jaringan Dokumentasi dan Informasi Tentang Pendapatan, Belanja, Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Serta Informasi Lainnya	Terwujudnya kemudahan akses informasi pengelolaan keuangan daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET		REALISASI	
			2019	2020	2019	2020
5	6	7	8	9	10	11
Pencetakan stiker pajak reklame	Tercapainya peningkatan penerimaan pajak reklame	7.300 lembar	7.300 lembar	7.500 lembar	7.500 lembar	7.500 lembar
Sosialisasi Pajak daerah	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap pajak daerah	200 peserta	80%	8 pajak daerah	8 pajak daerah	8 pajak daerah
Administrasi keberatan pajak daerah	Terwujudnya pelayanan pajak daerah yang optimal	1 Tahun	1 Tahun	100 WP	100 WP	100 WP
Pengelolaan pemeriksaan pajak daerah	Terwujudnya pengelolaan pajak yang tertib	1 Tahun = 100 WP	1 Tahun	100 WP	100 WP	100 WP
Pendataan dan Pengelolaan PPJ untuk Peningkatan PAD	Terdatanya jumlah penerimaan dan beban pajak penerangan jalan umum	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan
Cetak Massal SPPT PBB-P2	Tercapainya target penerimaan PBB P2	434.332 SPPT	419.751 SPPT	433.239 SPPT	433.239 SPPT	433.239 SPPT
Fasilitasi Pelayanan Pajak Daerah	Terwujudnya peningkatan pelayanan pajak daerah yang tertib	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Peningkatan manajemen pengelolaan pendapatan daerah	Terwujudnya manajemen pengelolaan pajak daerah yang efektif dan optimal	1 Tahun	1 Tahun	75 ASN	75 ASN	75 ASN
Fasilitasi pengurusan pinjaman daerah	Dokumen administrasi pinjaman daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	0	0	0
Penataan penggajian PNS Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya tertib administrasi gaji Kabupaten Karanganyar	Penggajian PNS untuk 61 OPD	61 OPD	61 SKPD	61 SKPD	61 SKPD

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET		REALISASI	
			2019	2020	2019	2020
5	6	7	8	9	10	11
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Terwujudnya administrasi dokumen perencanaan dan pelaporan kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Penelitian dan pemeriksaan tingkat lanjut sebagai upaya peningkatan PAD dari sektor pajak	Terwujudnya peningkatan PAD dari sektor pajak daerah melalui pemeriksaan WP tidak taat pajak	1 Tahun = 50 WP	1 Tahun	120 WP	120 WP	120 WP
Peningkatan kesadaran akan kepatuhan pembayaran pajak daerah	Terwujudnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak daerah	Pendapatan 1 Tahun	1 Tahun	Pendapatan 1 Tahun	Pendapatan 1 Tahun	Pendapatan 1 Tahun
Penyusunan dan Cetak Peraturan Daerah Tentang TGR Daerah	Tersusunnya buku Perda TGR daerah	-	1 PERDA	225 buku	225 buku	225 buku
Fasilitasi dan Pelaporan Data Profesi Guru	Terbayarnya tunjangan profesi guru tepat waktu	1 Tahun	1 Tahun	4320 Guru	4320 Guru	4320 Guru
Bimbingan Teknis Akuntansi Keuangan Daerah	Peningkatan kompetensi bagi OPD	43 PPK SKPD, 21 Bendahar a Puskemas	43 OPD, PUSKESMAS, UPT, SLTP, DESA	43 OPD ,5 UPT Dinkes, 15 SLTP dan 4 Koordinator Kec/UP T Dikbud	43 OPD ,5 UPT Dinkes, 15 SLTP dan 4 Koordinator or Kec/UPT Dikbud	43 OPD ,5 UPT Dinkes, 15 SLTP dan 4 Koordinator Kec/UPT Dikbud
Penertipan pajak reklame	Terwujudnya penegakan hukum dan aturan mengenai pengelolaan pajak reklame	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET		REALISASI	
			2019	2020	2019	2020
5	6	7	8	9	10	11
Administrasi Cash Management On Line	Termonitoringnya transfer dana ke rekening kas umum daerah	Administrasi Cash Management On Line 1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Penanganan permasalahan TPTGR Keuangan Barang Daerah	Terwujudnya penyelesaian permasalahan TPTGR	61 SKPD	61 SKPD	55 kasus	55 kasus	55 kasus
Fasilitasi Penyampaian SPPT PBB-P2	Tercapainya optimalisasi penerimaan PBB P-2	95%	95%	433.244.000	433.244.000	433.244.000
Penataan dan Pengelolaan Arsip	Terwujudnya kerapian dan keamanan arsip / dokumen yang baik	21.796 Dokumen	21.796 Dokumen	21796 Dokumen	21796 Dokumen	21796 Dokumen
Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah	Tertib administrasi pendapatan daerah		200 Laporan	200 laporan	200 laporan	200 laporan
Pengembangan Peta PBB online berbasis Web	Terlaksananya pengembangan Peta PBB online berbasis Web	0	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
Penyusunan Laporan Keuangan (LK) PPKD	Tersusunnya laporan keuangan PPKD yang tepat waktu dan akuntabel	LK PPKD Tahun 2018	0	LK PPKD Tahun 2019	LK PPKD Tahun 2019	LK PPKD Tahun 2019
Fasilitasi Pinjaman Daerah	Tersedianya anggaran biaya pokok angsuran dan bunga pinjaman daerah	-	0	0	0	0
Program Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Aset Daerah yang dikelola dengan baik			100%	100%	100%
Penyusunan Standar Satuan Harga.	Tersedianya buku standar biaya	290 buku/3 kegiatan	0	290 buku	290 buku	290 buku

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET		REALISASI	
			2019	2020	2019	2020
5	6	7	8	9	10	11
Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Persentase laporan Aset sesuai SAP	0	0	80%	80%	80%
Rekonsiliasi data BMD	Data aset untuk LKPD	43 OPD	0	43 OPD	43 OPD	43 OPD
Pemutakhiran data pada SIMDA BMD	Pemeliharaan aplikasi Simda BMD	43 OPD	0	43 OPD	43 OPD	43 OPD
Pengelolaan Gedung Wanita	Pemeliharaan dan pengamanan Gedung Wanita	1 tahun	0	1 tahun	1 tahun	1 tahun
Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola barang milik daerah	Terlaksananya kegiatan capacity building bagi pengurus barang	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan BMD	Tertib administrasi dan terkendalinya data pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan	1 kegiatan	0	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Penyusunan Peraturan Tentang Barang Milik Daerah.	Penyusunan Perda dan Perbub	150 buku	0	150 buku	150 buku	150 buku
Pelaksanaan lelang tanah Milik Pemda yang berasal dari tanah Kas Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan	Lelang tanah eks bondo desa	14 kelurahan	0	14 kelurahan	14 kelurahan	14 kelurahan
Sensus Barang Milik Daerah (KIB A, B,C,D,E,dan F	Sensus Barang Milik Daerah (KIB A, B,C,D,E,dan F		0			

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET		REALISASI	
			2019	2020	2019	2020
5	6	7	8	9	10	11
Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD.	Kegiatan penghapusan dan Penaksiran. Pemindahtanganan BMD berupa : penjualan, penyertaan modal, dan tukar menukar	-	0	42 OPD	42 OPD	42 OPD
Digitalisasi Arsip Dokumen Kepemilikan Aset.	Digitalisasi Arsip Dokumen Kepemilikan Aset.	-	0	4 Kelurahan	4 Kelurahan	4 Kelurahan
Program Perencanaan Penganggaran	Ketepatan Penyusunan APBD			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Penyusunan APBD tahun berjalan	Tersedianya buku pedoman APBD TA. 2019	150 Set	0	150 set buku APBD	150 set buku APBD	150 set buku APBD
Rapat koordinasi Bidang Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	Tercapainya target realisasi pendapatan daerah yang tepat	60 Buku	0	2 kali kegiatan	2 kali kegiatan	2 kali kegiatan
Penyusunan perubahan APBD tahun berjalan	Persentase APBD dengan RKPD	0	90%	90%	90%	90%
Penyusunan APBD tahun rencana	Tersedianya buku pedoman APBD TA. 2019	150 set	0	150 set buku	150 set buku	150 set buku
Pengelolaan administrasi belanja bantuan	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan belanja bantuan	1 Tahun	0	12 kali kegiatan	12 kali kegiatan	12 kali kegiatan

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET		REALISASI	
			2019	2020	2019	2020
5	6	7	8	9	10	11
Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja	Terwujudnya akurasi data sesuai RKPD	Kegiatan Akurasi Data	0	4 kali Kegiatan	4 kali Kegiatan	4 kali Kegiatan
Verifikasi DPA dan DPA Perubahan OPD	Tersedianya DPA dan DPA perubahan yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	60 SKPD	0	DPA-SKPD PPKD	DPA-SKPD PPKD	DPA-SKPD PPKD

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Tahun 2021-2022

Kabupaten Karanganyar

Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Program/kegiatan/Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(7)	(8)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip	68	69	70,66	70,88
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Terwujudnya administrasi dokumen perencanaan dan pelaporan kegiatan dengan baik	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan penatausahaan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya dokumen gaji dan tunjangan ASN	14 kali	14 kali	14 kali	14 kali

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Terwujudnya administrasi keuangan yang baik	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatkan kinerja aparatur	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan makanan dan minuman	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	21796 Dokumen	1 Tahun	21796 Dokumen	1 Tahun
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terwujudnya kerapian dan keamanan arsip/dokumen yang baik	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya kemudahan akses informasi pengelolaan keuangan daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Kendaraan Pengangkut Barang	5 Unit Kendaraan	1 Kendaraan Pengangkut Barang	5 Unit Kendaraan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa surat menyurat	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	14 Kendaraan Dinas	13 Kendaraan	14 Kendaraan Dinas	13 Kendaraan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana reklame dengan baik	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	100%	100%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersedianya buku pedoman APBD TA. 2019	140 set	125 set	140 set	125 set
Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUA perubahan PPAS	140 set	125 set	140 set	125 set
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Tersediannya RKA yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	60 SKPD	41 OPD	60 SKPD	41 OPD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Tersediannya RKA perubahan yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	60 SKPD	41 OPD	60 SKPD	41 OPD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Tersediannya DPA yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	60 SKPD	41 OPD	60 SKPD	41 OPD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Tersediannya Perubahan DPA yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	60 SKPD	41 OPD	60 SKPD	41 OPD

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersedianya buku pedoman APBD TA. 2019	140 set buku APBD	125 Dokumen	140 set buku APBD	125 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Tersedianya buku pedoman APBD TA. 2019	140 set	125 Dokumen	140 set	125 Dokumen
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaaksananya perencanaan anggaran pendapatan	2 kali kegiatan	11 OPD	2 kali kegiatan	11 OPD
Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Terlaksananya anggaran belanja daerah	4 kali Kegiatan	41 OPD	4 kali Kegiatan	41 OPD
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	100%	100%	100%	100%
Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Terselenggaraan kegiatan penerbitan dan verifikasi anggaran kas dan SPD	61 SKPD	41 OPD	61 SKPD	41 OPD
Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan transfer lainnya	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan dana pusat dan daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non-tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Terlaksananya kegiatan pemantauan transaksi npn tunai daegan tertib	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kasda laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	Tercetaknya daftar gaji, laporan pertanggung jawaban perhitungan pihak ketiga (PFK)	61 SKPD	41 OPD	61 SKPD	41 OPD
Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Terselenggaraan kegiatan pengelolaan kas daerah dan penempatan uang daerah /deposito	12 kali	1 Tahun	12 kali	1 Tahun

Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Tercetak register advis SP2D	61 SKPD	41 OPD	61 SKPD	41 OPD
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan	Terselenggaranya kegiatan penyusunan sisdur pengelolaan keuangan / teknis administrasi keuangan	200 buku	1 Sisdur	200 buku	1 Sisdur
Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan bendahara gaji se- kabuapten Karanganyar	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terwujudnya Pelaporan Keuangan dan Terlaksananya Administrasi data yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Tertib administrasi data keuangan	43 OPD ,4 UPT Dinkes, 14 SLTP dan 4 Koordinator Kec/UPT Dikbud	41 OPD	43 OPD ,4 UPT Dinkes, 14 SLTP dan 4 Koordinator Kec/UPT Dikbud	41 OPD
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan sementara OPD	43 OPD	41 OPD	43 OPD	41 OPD
Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya LKPD/Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu dan Akuntabel	90%	1100 Buku	90%	1100 Buku
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya buku analisis LKPD	LK PPKD Tahun 2019	41 OPD	LK PPKD Tahun 2019	41 OPD
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya perbub kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Perbub kebijakan akuntansi dan Perbub SAPD	100 OPD,UPT, PUSKESMA S	Perbub kebijakan akuntansi dan Perbub SAPD	100 OPD,UPT, PUSKESMA S

Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemda	Tersusunnya Perbub Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Terlaksananya Pengembangan SDM Akuntansi Keuangan Daerah	Perbub SAPD dan Pengembangan SDM 43 OPD	41 OPD	Perbub SAPD dan Pengembangan SDM 43 OPD	41 OPD
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan kompetensi bagi OPD	43 OPD ,4 UPT Dinkes, 14 SLTP dan 4 Koordinator Kec/UPT Dikbud	41 OPD,UPT, PUSKESMAS	43 OPD ,4 UPT Dinkes, 14 SLTP dan 4 Koordinator Kec/UPT Dikbud	41 OPD,UPT, PUSKESMAS
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif , efisien, transparan dan akuntabel	100%	100%	100%	100%
Analisis Perencanaan dan pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah daerah	Pelunasan kewajiban pembayaran bunga pinjaman pemerintah daerah selama satu tahun	1 tahun	1 Tahun	1 tahun	1 Tahun
Analisis perencanaan dan Penyaluran bantuan Keuangan	Tersedia alokasi belanja keuangan kepada desa	1 tahun	1 Tahun	1 tahun	1 Tahun
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya dan untuk kepentingan darurat atau mendesak yang dapat dibayarkan untuk kepentingan dimaksud dengan tetap	1 tahun	1 Tahun	1 tahun	1 Tahun
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Tersedianya alokasi belanja bagi hasil pemerintah ke dasa	1 tahun	1 Tahun	1 tahun	1 Tahun
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel	90%	90%	100%	100%
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel.	90%	90%	100%	100%
Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersusunnya Perbup terkait Standar satuan harga	290 buku	1 Perbup	290 buku	1 Perbup
Pentausahaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan aplikasi dan data BMD Pada aplikasi	1 tahun	2 Aplikasi	1 tahun	2 Aplikasi
Inventarisasi Barang Milik daerah	Terselenggaranya investasi B,D/Sensus	42 OPD	41 OPD	42 OPD	41 OPD
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	42 OPD	41 OPD	42 OPD	41 OPD

Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik daerah	Terselenggaranya pemerintahan gedung - gedung dalam penguasaan pengelola BMD dan terselenggaranya pengawasan pengelolaan BMD	1 tahun	5 Gedung dan 41 OPD	1 tahun	5 Gedung dan 41 OPD
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik daerah	Terselenggaranya rapat dan perjalanan dinas terkait penghapusan dan pemindahtanganan BMD	140 buku	41 OPD	140 buku	41 OPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Data aset untuk LKPD	14 kelurahan	41 OPD	14 kelurahan	41 OPD
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah	Terlaksananya kegiatan capacity building bagi pengurus barang	42 OPD	41 OPD	42 OPD	41 OPD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Optimalisasi Pendapatan Daerah	1 kegiatan	95%	1 kegiatan	100%
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Tertib.	95%	95%	100%	100%
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Terlaksananya sosialisai pajak daerah dan terwujudnya perhitungan pajak daerah yang akuntabel	410.000 WP	9 Pajak Daerah dan 2 Buku Kajian	410.000 WP	9 Pajak Daerah dan 2 Buku Kajian
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tercetaknya stiker pajak reklame	7.400 lembar	7500 lembar	7.400 lembar	7500 lembar
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terbentunya informasi peta PBB online berbasis Web , Tercapainya pemutakiran data BPHTB ke DATA PBB, Terlaksananya pemeliharaan basis data objek pajak bumi dan bangunan dan Tersampaikan SPPT PBB P2	100 %	450000 Wajib Pajak , 1300 Berkas .200000 Wajib Pajak ,dan 450000 SPPT	100 %	450000 Wajib Pajak , 1300 Berkas .200000 Wajib Pajak ,dan 450000 SPPT
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tercetaknya SPPT PBB P2 dan Terwujutnya pemutakiran data objek dan subjek	433.239 SPPT	450000 Lembar SPTT dan 9 Pajak daerah	433.239 SPPT	450000 Lembar SPTT dan 9 Pajak daerah
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah	Terselenggaranya pengelolaan pajak daerah	433.239 SPPT	1 Tahun	433.239 SPPT	1 Tahun
Penagihan Pajak daerah	Terselenggaranya kegiatan percepatan pemasukan pajak daerah	17 Kecamatan	410000 Wajib Pajak	17 Kecamatan	410000 Wajib Pajak

Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	Terlaksananya kegiatan keberatan dan banding	100 WP	1 Tahun	100 WP	1 Tahun
Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak daerah	Terdatanya jumlah penerimaan dan beban pajak penerangan jalan umum	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan

Berdasarkan Tabel 2.6. dapat diperoleh informasi tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Badan keuangan Daerah dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2022. Terlihat bahwa yang telah mencapai target adalah Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 100% kinerja pelayanan dapat terlaksana. Pada Program lain yaitu Program Pengelolaan Barang Milik Daerah juga telah mencapai target yaitu sebesar 100% melalui Managemen Aset Daerah yang telah dilaksanakan oleh Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah. Program Pengelolaan Pendapatan daerah memiliki target sebesar 95% sedangkan realisasi pelayanannya mencapai lebih dari 100%.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Tahun 2019-2020
Kabupaten Karanganyar

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		REALISASI	
		2019	2020	2019	2020
		3	4	5	6
1	2				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	34.454.301.000	34.371.442.000	30.494.480.722	33.419.050.825
Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	207.735.000	207.665.500	153.981.700	202.881.100
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	32.556.080.000	32.953.395.000	29.254.382.298	32.187397.949
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	489.538.000	618.411.500	427.491.475	535.233.950
Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	154.398.000	159.840.000	151.763.850	157.135.025

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET			REALISASI	
		2019	2020		2019	2020
		3	4		5	6
1	2					
Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	426.550.000	297.130.000		192.503.500	223.375.500
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/ luar daerah	620.000.000	135.000.000		314.357.899	113.027.301
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana	4.806.599.000	8.428.818.000		1.031.545.737	7.778.708.708
pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional	2.795.000.000	6.220.000.000		47.061.000	5.740.900.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	144.000.000	812.300.000		65.500.000	805.925.000

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		REALISASI	
		2019	2020	2019	2020
		3	4	5	6
1	2				
Pengadaan Komputer	Jumlah pengadaan komputer	398.900.000	199.950.000	193.600.000	198.050.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	585.000.000	499.000.000	245.752.480	481.752.500
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional	383.880.000	345.268.000	221.462.607	284.021.508
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	424.819.000	302.300.000	237.033.650	236.180.700
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir	75.000.000	50.000.000	21.136.000	31.879.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	740.000.000	616.000.000	412.391.823	528.357.500

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		REALISASI	
		2019	2020	2019	2020
		3	4	5	6
1	2				
Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kinerja aparatur	140.000.000	381.000.000	60.441.823	297.132.500
Peningkatan SDM	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	600.000.000	235.000.000	351.950.000	231.225.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Tertip Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	315.972.000	264.819.200	259.761.250	245.399.800
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan penatausahaan	97.472.000	107.469.200	74.813.000	91.766.700
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedianya buku laporan keuangan semesteran	12.000.000	10.425.000	12.000.000	9.673.550

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		REALISASI	
		2019	2020	2019	2020
		3	4	5	6
1	2				
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terwujudnya administrasi keuangan yang baik	15.000.000	16.500.000	5.668.750	15.271.750
Pengembangan Sistem Akuntansi	Terlaksananya pengembangan SDM dan pengembangan akuntansi keuangan	114.000.000	104.550.000	94.029.500	103.022.800
Asistensi Pengelolaan SDM Keuangan Daerah	Tertib administrasi keuangan daerah	27.500.000	25.875.000	25.290.000	25.665.000
Penyusunan Renstra OPD	Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis BKD Tahun 2019-2023	50.000.000	0	47.960.000	0

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		REALISASI	
		2019	2020	2019	2020
		3	4	5	6
1	2				
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	Cakupan Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	8.036.571.500	6.072.272.000	6.310.135.028	5.840.192.376
Penyusunan / Penyempurnaan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya buku Perbub Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	148.000.000	67.500.000	127.139.000	58.150.000
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya pengelolaan keuangan yang sistematis dan akuntable	60.000.000	0	12.082.000	0
Penerbitan dan Verifikasi SPD	Tersedianya surat penyedia dana (SPD)	30.000.000	30.000.000	29.167.000	29.374.000

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		REALISASI	
		2019	2020	2019	2020
		3	4	5	6
1	2				
Fasilitasi Pengelolaan Sistem Pendapatan Daerah	Terwujudnya sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah yang memadai	291.500.000	189.000.000	103.200.000	187.265.000
Pemutakhiran data obyek dan subyek pajak daerah	Terlaksananya pemutakhiran Data Objek dan Subjek Subyek pajak daerah	748.744.000	665.510.300	737.748.980	663.805.310
Pengelolaan BPHTB	Terlaksananya pengelolaan PD	114.500.000	125.500.000	110.777.700	123.736.850
Pemeliharaan Sarana Reklame	Pemeliharaan Sarana Reklame dengan baik	50.000.000	30.000.000	24.750.000	29.500.000
Adminstrasi Pengelolaan Kas Daerah dan Deposito	Terwujudnya pengelolaan kas daerah dan deposito yang akuntable	35.000.000	28.000.000	34.590.000	27.174.000

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		REALISASI	
		2019	2020	2019	2020
		3	4	5	6
1	2				
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase laporan keuangan OPD lengkap dan tepat waktu	535.500.000	377.550.000	510.675.227	365.036.050
Penyusunan laporan data gaji Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya cetak daftar gaji PNS se Kabupaten	35.000.000	30.500.000	34.746.000	30.113.000
Administrasi Penertiban dan Pengelolaan SP2D	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan Tahun 2019	215.000.000	208.000.000	213.546.000	205.466.000
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Pajak	Terwujudnya administrasi tentang piutang PBB yang tertib dan akuntable	127.955.000	0	0	0

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		REALISASI	
		2019	2020	2019	2020
		3	4	5	6
1	2				
Evaluasi dan Pelaporan Dana Pusat dan Daerah	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan dana pusat dan daerah	100.000.000	31.000.000	77.564.874	29.617.124
Administrasi komputerisasi gaji dan pencetakan daftar gaji	Terwujudnya penggajian yang tepat akurat dan cermat	255.000.000	288.000.000	244.596.800	286.372.000
Pemeliharaan Basis data Obyek dan subyek PBB	Terwujudnya akurasi data obyek dan subyek pajak PBB	217.000.000	208.000.000	209.309.050	205.372.000
Pembinaan wilayah pungutan PBB	Terwujudnya optimalisasi penerimaan PBB	109.500.000	0	103.755.000	0

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		REALISASI	
		2019	2020	2019	2020
		3	4	5	6
1	2				
Rekonsiliasi data Akuntansi Keuangan dan Non Keuangan	Tertib administrasi data keuangan	43.000.0000	33.497.200	32.000.000	33.496.500
Percepatan pemasukan pajak daerah	Terpenuhinya target pemasukan pajak daerah tahun 2019	1.030.500.000	1.416.641.000	914.036.800	1.167.182.642
Pengembangan Sistem E-Government Jaringan Dokumentasi dan Informasi Tentang Pendapatan, Belanja, Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Serta Informasi Lainnya	Terwujudnya kemudahan akses informasi pengelolaan keuangan daerah	335.000.000	357.500.000	74.005.500	345.007.500
Pencetakan stiker pajak reklame	Tercapainya peningkatan penerimaan pajak reklame	50.000.000	55.000.000	47.615.000	52.524.000

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		REALISASI	
		2019	2020	2019	2020
		3	4	5	6
1	2				
Sosialisasi Pajak daerah	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap pajak daerah	84.588.000	112.530.000	82.726.500	110.030.000
Administrasi keberatan pajak daerah	Terwujudnya pelayanan pajak daerah yang optimal	30.000.000	15.600.000	25.109.000	10.729.000
Pengelolaan pemeriksaan pajak daerah	Terwujudnya pengelolaan pajak yang tertib	97.900.000	66.500.000	87.222.500	56.418.000
Pendataan dan Pengelolaan PPJ untuk Peningkatan PAD	Terdatanya jumlah penerimaan dan beban pajak penerangan jalan umum	373.690.000	137.500.000	298.934.014	118.559.600
Cetak Massal SPPT PBB-P2	Tercapainya target penerimaan PBB P2	303.315.000	313.508.000	298.258.000	307.356.900

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		REALISASI	
		2019	2020	2019	2020
		3	4	5	6
1	2				
Fasilitasi Pelayanan Pajak Daerah	Terwujudnya peningkatan pelayanan pajak daerah yang tertib	349.000.000	218.600.000	197.452.000	216.052.000
Peningkatan manajemen pengelolaan pendapatan daerah	Terwujudnya manajemen pengelolaan pajak daerah yang efektif dan optimal	94.500.000	105.450.000	86.916.000	96.710.000
Fasilitasi pengurusan pinjaman daerah	Dokumen administrasi pinjaman daerah	967.305.000	0	374.191.255	0
Penataan penggajian PNS Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya tertib administrasi gaji Kabupaten Karanganyar	40.000.000	32.950.000	29.767.750	32.066.500

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		REALISASI	
		2019	2020	2019	2020
		3	4	5	6
1	2				
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Terwujudnya administrasi dokumen perencanaan dan pelaporan kegiatan	155.056.000	25.761.600	144.589.000	20.769.850
Penelitian dan pemeriksaan tingkat lanjut sebagai upaya peningkatan PAD dari sektor pajak	Terwujudnya peningkatan PAD dari sektor pajak daerah melalui pemeriksaan WP tidak taat pajak	130.000.000	95.425.500	109.263.000	90.001.000
Peningkatan kesadaran akan kepatuhan pembayaran pajak daerah	Terwujudnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak daerah	50.000.000	23.350.000	42.103.000	20.650.000

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		REALISASI	
		2019	2020	2019	2020
		3	4	5	6
1	2				
Penyusunan dan Cetak Peraturan Daerah Tentang TGR Daerah	Tersusunnya buku Perda TGR daerah	80.000.000	47.500.000	53.771.500	44.220.500
Fasilitasi dan Pelaporan Data Profesi Guru	Terbayarnya tunjangan profesi guru tepat waktu	30.000.000	25.000.000	29.708.500	24.100.000
Bimbingan Teknis Akuntansi Keuangan Daerah	Peningkatan kompetensi bagi OPD	103.500.000	44.468.500	91.485.050	38.453.500
Penerbitan pajak reklame	Terwujudnya penegakan hukum dan aturan mengenai pengelolaan pajak reklame	185.000.000	76.850.000	171.786.000	292.595.500

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		REALISASI	
		2019	2020	2019	2020
		3	4	5	6
1	2				
Administrasi Cash Management On Line	Termonitoringnya transfer dana ke rekening kas umum daerah	25.000.000	25.000.000	24.630.205	24.761.250
Penanganan permasalahan TPTGR Keuangan Barang Daerah	Terwujudnya penyelesaian permasalahan TPTGR	40.000.000	30.000.000	31.988.423	25.214.000
Fasilitasi Penyampaian SPPT PBB-P2	Tercapainya optimalisasi penerimaan PBB P-2	362.653.000	353.250.000	348.504.500	292.595.500
Penataan dan Pengelolaan Arsip	Terwujudnya kerapian dan keamanan arsip / dokumen yang baik	141.830.000	95.288.000	131.053.900	94.300.500
Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah	Tertib administrasi pendapatan daerah	10.000.000	0	9.370.000	0

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET			REALISASI	
		2019	2020		2019	2020
		3	4		5	6
1	2					
Pengembangan Peta PBB online berbasis Web	Terlaksananya pengembangan Peta PBB online berbasis Web	0	75.000.000		0	74.625.000
Penyusunan Laporan Keuangan (LK) PPKD	Tersusunnya laporan keuangan PPKD yang tepat waktu dan akuntable	0	11.541.900		0	10.791.800
Fasilitasi Pinjaman Daerah	Tersedianya anggaran biaya pokok angsuran dan bunga pinjaman daerah	0	0		0	0
Program Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Aset Daerah yang dikelola dengan baik	1.219.135.000	943.955.000		880.319.780	810.396.800
Penyusunan Standar Satuan Harga.	Tersedianya buku standar biaya	41.238.600	51.514.000		37.832.850	49.360.000

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		REALISASI	
		2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Persentase laporan Aset sesuai SAP	180.680.350	151.654.000	166.348.126	144.803.500
Rekonsiliasi data BMD	Data aset untuk LKPD	104.468.250	57.539.000	65.620.250	55.922.000
Pemutakhiran data pada SIMDA BMD	Pemeliharaan aplikasi Simda BMD	97.786.100	92.505.000	95.166.950	91.385.000
Pengelolaan Gedung Wanita	Pemeliharaan dan pengamanan Gedung Wanita	119.980.000	85.000.000	79.239.304	78.670.806
Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola barang milik daerah	Terlaksananya kegiatan capacity building bagi pengurus barang	124.024.000	0	118.961.000	0

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		REALISASI	
		2019	2020	2019	2020
		3	4	5	6
1	2				
Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan BMD	Tertib administrasi dan terkendalinya data pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan	40.585.000	59.824.000	35.963.000	54.830.000
Penyusunan Peraturan Tentang Barang Milik Daerah.	Penyusunan Perda dan Perbub	57.965.000	60.310.000	26.059.050	48.493.000
Pelaksanaan lelang tanah Milik Pemda yang berasal dari tanah Kas Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan	Lelang tanah eks bondo desa	154.880.700	129.229.000	115.053.900	121.510.550

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		REALISASI	
		2019	2020	2019	2020
		3	4	5	6
1	2				
Sensus Barang Milik Daerah (KIB A, B, C, D, E, dan F	Sensus Barang Milik Daerah (KIB A, B, C, D, E, dan F	0	0	0	0
Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD.	Kegiatan penghapusan dan Penaksiran. Pemindahtanganan BMD berupa : penjualan, penyertaan modal, dan tukar menukar	297.527.000	256.380.000	140.075.350	244.092.750
Digitalisasi Arsip Dokumen Kepemilikan Aset.	Digitalisasi Arsip Dokumen Kepemilikan Aset.	0	0	0	0
Program Perencanaan Penganggaran	Ketepatan Penyusunan APBD	1.269.401.000	1.138.408.800	1.055.509.925	1.057.286.506

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		REALISASI	
		2019	2020	2019	2020
		3	4	5	6
1	2				
Penyusunan APBD tahun berjalan	Tersedianya buku pedoman APBD Tahun Berjalan	378.950.000	302.025.000	338.171.778	298.010.043
Rapat koordinasi Bidang Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	Tercapainya target realisasi pendapatan daerah yang tepat	19.759.000	11.177.000	18.114.500	10.959.500
Penyusunan perubahan APBD tahun berjalan	Persentase APBD dengan RKPD	335.855.000	322.393.400	268.325.448	284.673.579
Penyusunan APBD tahun rencana	Tersedianya buku pedoman APBD Tahun Rencana	183.511.000	303.862.400	135.159.199	283.461.884

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET			REALISASI	
		2019	2020		2019	2020
		3	4		5	6
1	2					
Pengelolaan administrasi belanja bantuan	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan belanja bantuan	25.552.000	30.672.000		23.914.250	30.007.000
Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja	Terwujudnya akurasi data sesuai RKPD	141.933.000	31.938.000		141.358.250	31.099.500
Verifikasi DPA dan DPA Perubahan OPD	Tersedianya DPA dan DPA perubahan yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	183.841.000	136.341.000		130.466.500	119.075.000

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2022
Kabupaten Karanganyar

URAIAN	TARGET		REALISASI	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	53,635,839,000	64,878,383,204	51,557,652,991	60,755,745,943
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	293,450,000	305,519,800	288,235,250	285,838,100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	200,000,000	200,422,000	198,431,250	183,137,800
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	93,450,000	105,097,800	89,804,000	102,700,300
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17,951,619,000	19,143,192,004	16,316,807,205	16,772,481,584
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17,935,619,000	19,127,192,004	16,300,757,255	16,756,481,584
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	16,000,000	16,000,000	16,049,950	16,000,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36,250,000	300,285,250	33,966,045	294,267,250
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36,250,000	300,285,250	33,966,045	294,267,250
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,527,500,000	2,481,222,200	2,455,233,111	2,399,944,158
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	497,150,000	605,438,700	485,835,000	569,041,320
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	988,060,000	0	941,845,755	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	260,000,000	372,667,000	259,372,500	370,392,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	352,690,000	1,003,166,000	352,408,606	999,138,338
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	143,200,000	177,228,000	136,582,000	161,960,000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	286,400,000	322,722,500	279,189,250	299,412,500
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,163,700,000	2,030,435,000	1,147,000,000	1,946,660,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,163,700,000	2,030,435,000	1,147,000,000	1,946,660,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29,990,540,000	38,845,868,950	29,961,020,902	37,390,286,553
Penyediaan jasa surat menyurat	170,000,000	252,904,500	169,991,050	252,904,470

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	29,770,540,000	37,288,980,000	29,741,438,557	35,995,116,248
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,000,000	125,288,100	49,591,295	124,697,145
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	1,178,696,350	0	1,017,568,690
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,381,940,000	1,771,860,000	1,355,390,478	1,666,268,298
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	271,600,000	479,800,000	269,284,178	406,315,473
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500,840,000	678,090,000	491,618,300	658,812,825
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	504,000,000	400,000,000	490,555,000	389,505,000
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90,000,000	153,970,000	88,683,000	151,635,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,500,000	60,000,000	15,250,000	60,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	354,693,276,800	366,172,357,200	183,361,159,640	142,348,812,723
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1,077,000,000	1,315,825,000	1,000,778,300	1,098,674,970
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	68,770,000	99,943,800	65,417,700	98,747,000
Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	69,595,000	119,867,100	67,426,000	119,020,800
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	26,057,000	31,436,900	25,307,000	31,176,900
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	21,407,000	27,374,300	20,707,000	26,684,300
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	40,517,000	73,246,100	40,198,500	31,998,400
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	36,723,000	42,375,100	35,423,000	40,575,100
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	189,894,600	304,327,600	154,799,750	170,086,050
Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	215,629,600	205,512,800	207,707,600	203,071,820
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	57,012,500	88,453,500	56,505,750	88,041,500
Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	351,394,300	323,287,800	327,286,000	289,273,100
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1,068,800,000	1,259,400,000	1,005,327,274	1,164,252,950

Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	32,721,700	41,621,700	31,037,000	38,672,600
Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan transfer lainnya	42,046,000	141,385,200	39,736,145	137,690,250
Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non-tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	19,318,800	12,330,500	18,620,000	11,243,000
Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kasda laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	465,300,000	614,562,000	440,177,029	609,320,500
Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	23,464,700	19,615,700	22,027,000	17,972,400
Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	178,186,800	175,394,700	177,187,100	97,455,000
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan	56,962,000	11,483,700	34,920,000	11,483,700
Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	250,800,000	243,006,500	241,623,000	240,415,500
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1,309,167,000	1,344,202,000	1,192,925,411	1,303,840,214
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	48,608,600	46,065,500	42,724,500	46,065,500
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	12,052,100	13,293,100	11,098,100	13,293,100
Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	726,659,900	742,903,400	698,124,486	725,178,934
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	95,256,100	51,947,700	84,942,000	51,590,600

Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	71,603,600	128,743,600	58,489,600	119,736,000
Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemda	33,529,200	38,456,500	29,819,200	38,456,500
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	321,457,500	322,792,200	267,727,525	309,519,580
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	345,669,653,800	362,252,930,200	180,162,128,655	138,782,044,589
Analisis Perencanaan dan pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah daerah	2,984,000,000	500,000,000	2,630,930,455	423,300,339
Analisis perencanaan dan Penyaluran bantuan Keuangan	314,196,665,000	336,736,197,400	151,169,493,000	123,896,246,000
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10,000,000,000	5,000,000,000	7,872,716,400	2,222,998,250
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	18,488,988,800	20,016,732,800	18,488,988,800	12,239,500,000
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1,239,688,000	1,500,546,000	1,157,181,909	1,384,059,457
Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,239,688,000	1,500,546,000	1,157,181,909	1,384,059,457
Penyusunan Standar Satuan Harga	56,514,000	81,490,000	52,927,000	75,440,000
Pentausahaan Barang Milik Daerah	75,257,000	108,995,000	73,771,000	106,661,300
Inventarisasi Barang Milik daerah	51,891,000	136,494,000	31,421,100	119,642,500
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	199,315,000	127,461,000	181,682,300	124,278,000
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik daerah	369,894,000	403,765,000	343,942,509	366,753,073
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik daerah	257,986,000	385,348,000	250,709,000	367,475,584
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	75,888,000	83,422,000	72,991,000	65,570,000
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah	152,943,000	173,571,000	147,738,000	158,239,000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4,167,680,000	4,659,552,500	3,932,976,833	4,446,938,840
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4,167,680,000	4,659,552,500	3,932,976,833	4,446,938,840
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	308,679,500	272,990,100	291,553,500	268,775,500
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	70,000,000	70,000,000	61,933,850	43,674,750
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1,094,160,000	1,121,550,000	1,039,385,150	1,076,977,350
Penetapan Wajib Pajak Daerah	1,082,590,500	1,254,907,400	1,078,186,850	1,208,087,208

Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah	125,000,000	100,000,000	98,318,400	94,122,300
Penagihan Pajak daerah	1,197,250,000	1,201,330,000	1,137,458,583	1,155,260,457
Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	20,000,000	20,000,000	10,232,300	6,120,300
Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak daerah	270,000,000	618,775,000	215,908,200	593,920,975

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Kabupaten dan telaah RTRW maupun KLHS maka dapat diketahui bahwa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2024-2026 menghadapi tantangan pengembangan pelayanan antara lain:

- a. Terbatasnya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur;
- b. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal;
- c. Kurang optimalnya pengelolaan aset daerah;
- d. Belum dikembangkan Sistem Informasi Pelayanan publik untuk transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah :

- a. Kualitas, kompetensi dan kapasitas SDM Aparatur pengelola keuangan dan aset daerah yang masih bisa dikembangkan;
- b. Adanya berbagai peraturan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset;
- c. Pengembangan standar operasional dan prosedur dalam rangka pelayanan penyusunan anggaran, perbendaharaan, pelaporan keuangan, pengelolaan asset/ barang milik daerah;
- d. Mewujudkan pelayanan yang mudah dan cepat melalui pengembangan inovasi, baik inovasi pada sistem informasi maupun inovasi pelayanan keliling jemput bola;
- e. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kerja, baik perangkat keras maupun perangkat lunak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH

Permasalahan adalah gambaran bentuk kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan OPD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penentuan isu strategis adalah mengkaji permasalahan daerah dan tantangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi OPD dipergunakan untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangannya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar

Perumusan permasalahan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidak berhasilan dalam pengelolaan bidang keuangan dan asset pada tahun sebelumnya sesuai kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan yang ada merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat ini. Suatu permasalahan dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan langsung dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah beserta permasalahan yang masih dihadapi selama tahun 2024-2026 sebagaimana telah dibahas pada Bab 3 maka diidentifikasi permasalahan yang masih dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur;

2. Usulan anggaran kas yang disampaikan OPD sebagai dasar dalam membuat Surat Penyediaan Dana (SPD) masih terlambat ;
3. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal;
4. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM penagihan,pemeriksa dan keberatan ;
5. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak belum optimal;
6. Masih terjadinya pergeseran kode rekening rincian belanja pasca APBD;
7. Belum maksimalnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola Akuntansi keuangan;
8. Kurang optimalnya pengelolaan aset daerah;
9. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan keuangan daerah.

Permasalahan pelayanan yang dihadapi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dapat diuraikan dalam table dibawah ini.

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Bidang	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Sekretariat	Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan keuangan daerah	Masih kurangnya sarana dan prasarana serta peralatan yang dimiliki yang berakibat pelayanan kepada masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal	Sistem dan prosedur belum dilaksanakan secara optimal, sehingga kinerja mengalami hambatan
2.	Bidang Anggaran	Masih terjadinya pergeseran kode rekening rincian belanja pasca APBD	1. Ketidaksesuaian rekening objek belanja pada DPA dengan kebutuhan riil OPD; 2. Adanya regulasi kebijakan pusat terkait dengan pendapatan transfer dan belanja yang	1. Masih kurangnya kualitas perencana OPD dalam penyusunan RKA terkait dengan belanja; 2. Adanya regulasi yang terbit setelah

No	Bidang	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			terlambat dimana KUA PPAS / RAPBD / APBD telah terlaksana.	KUA PPAS/RAPBD/ APBD ditetapkan
3.	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	1. Terbatasnya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur 2. Usulan anggaran kas yang disampaikan OPD sebagai dasar dalam membuat Surat Penyediaan Dana (SPD) masih terlambat	1. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan kas daerah dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar 2. Pengajuan SPM dari seluruh OPD masih ada yang belum sesuai dengan anggaran kas yang mengakibatkan volume pengajuan SPM pada akhir tahun meningkat	1. Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kas daerah 2. Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf.
4.	Bidang Akuntansi	Belum maksimalnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola Akuntansi keuangan	Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi	Pengawasan terhadap pengelolaan akuntansi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat dan meningkat intensitasnya menuntut SDM yang kompeten dibidangnya.
5.	Bidang Aset	Kurang optimalnya pengelolaan aset daerah	Asset daerah belum terinventarisir dan terdokumentasi dengan baik dan benar	1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan

No	Bidang	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
				asset daerah 2. Kurangnya kualitas SDM dalam menunjang bidang asset Kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam penyusunan pelaporan asset yang dimiliki
6.	Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal	1. Rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat sebagai WP 2. Ada kecurangan bagi WP	1. Belum optimalnya kualitas sistem informasi pendapatan daerah 2. Kurangnya dukungan sarpras 3. Kurangnya SDM yang berkualifikasi
7.	Bidang Penagihan Keberatan dan Pemeriksaan Pajak	1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal 2. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM penagihan, pemeriksaan dan keberatan 3. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak belum optimal	Belum optimalnya pemasukan dari penerimaan pendapatan asli daerah	1. Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah; 2. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia baik secara kuantitas maupun kualitas untuk melaksanakan kegiatan operasional yang telah direncanakan sehingga hasil

No	Bidang	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
				yang didapat belum maksimal dalam menunjang peningkatan penerimaan pajak daerah

3.2 Telaah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan Tahun 2024-2026 adalah **“Meningkatkan Daya Saing Daerah”**

Dari tujuan tersebut, maka untuk mencapai hasilnya diperlukan sasaran yang ditetapkan. Didalam RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan dan yang sesuai untuk Badan Keuangan Daerah Kabupeten Karanganyar adalah meningkatkan tata kelola pemerintah yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi kemudian dijabarkan dalam sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan BMD;
3. Optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah”

Selain hal yang terkait dengan peningkatan pengelolaan keuangan daerah, hal lain yang perlu diperhatikan oleh Badan Keuangan Daerah adalah kebijakan yang berkaitan dengan keuangan daerah, yakni peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana disebutkan dalam RPJMD. Kebijakan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Karanganyar:

- a. Intensifikasi PAD, melalui:
 - 1) Optimalisasi sistem pajak *on line* dengan menambahkan peralatan berupa *tapping box* (alat perekam transaksi) untuk meminimalisi penyimpangan data transaksi oleh wajib pajak daerah.

- 2) Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemeriksaan terhadap laporan keuangan wajib pajak daerah. Sehingga apabila ditemukan kekurangan bayar pajak daerah akan segera dikeluarkan OPD kurang bayar kepada wajib pajak.
 - 3) Penegakkan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.
 - 4) Optimalisasai Sumber Daya Manusia (SDM) pajak daerah (fiskus) melalui diklat pajak daerah, yaitu lanjutan diklat audit pajak dan pemeriksaan pajak maupun diklat yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas SDM perpajakan.
 - 5) Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan kepada wajib pajak daerah.
 - 6) Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah out of date menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
 - 7) Peningkatan koordinasi dengan OPD penghasil lain dan BUMD untuk optimalisasi pendapatan daerah.
 - 8) Penilaian kembali atas tanah dan bangunan dalam rangka optimalisasi penerimaan dari PBB perdesaan dan perkotaan.
 - 9) Verifikasi dan penyelesaian terhadap piutang PBB yang masih ada tunggakan.
- b. Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi, melalui:
- 1) Perubahan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian daerah dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 2) Perluasan subjek dan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (perluasan tax based) berdasarkan potensi yang sudah dihitung.
 - 3) Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kawasan-kawasan tertentu secara bertahap, dengan cara menggunakan Peta Zona Nilai Tanah tahun terbaru sebagai pedoman untuk perhitungan Nilai Pasar dan Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan.

Demikian juga perlu diperhatikan mengenai Kebijakan Belanja Daerah di Kabupaten Karanganyar selama Tahun 2024 – 2026, yang sudah disajikan dalam Renstra, yaitu :

- a. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Karanganyar, selama kurun waktu 2024-2026;

- b. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan, yaitu Urusan Wajib Dasar, Urusan Wajib Non Dasar, Urusan Pilihan, maupun urusan Penunjang Lainnya;
- c. Memenuhi pelaksanaan program yang sudah mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan operasional;
- d. Mengakomodasi program pembangunan yang dijamin melalui aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
- e. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja /pengangguran, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan pendapatan (baik antar golongan pendapatan maupun antar wilayah), dan peningkatan mutu modal manusia (IPM: Indeks Pembangunan Manusia);
- f. Diarahkan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar;
- g. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk pembiayaan pendidikan.

Untuk telaah dan sasaran OPD beserta faktor penghambat dan pendorong dapat dijabarkan dalam matrik dibawah ini.

Tabel 3. 2 Telaah Tujuan dan Sasaran OPD Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Dinas	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintah yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	1.Terbatasnya sarana dan prasarana; 2.Terbatasnya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1. Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah,	1. Komitmen dari para pemangku jabatan untuk maju dan bekerja lebih baik dalam pengelolaan keuangan

Sasaran : 1. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan, 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan BMD, 3. Optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur	asset daerah dan pengelolaan pendapatan daerah; 2. Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf;	daerah, asset daerah dan pengelolaan pendapatan daerah; 2. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi; 3. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
--	--	--	---

3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan RTRW

Telaah RTRW yang dimaksudkan adalah identifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar ditinjau dari implikasi RTRW. Mengingat Tupoksi Badan Keuangan Daerah memiliki tugas utama terkait dengan pelayanan pajak

dan retrebusi daerah maka tidak banyak berpengaruh atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh RTRW. Demikian pula yang terkait dengan pengelolaan atau pemanfaatan asset daerah juga tidak banyak terpengaruh atau mempengaruhi RTRW.

3.4.2 Telaahan KLHS

Badan Keuangan Daerah memiliki tugas utama terkait dengan pelayanan pengumpulan pajak dan retrebusi daerah, maka tidak banyak berpengaruh atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh KLHS. Dalam dokumen KLHS tidak ditemukan program Badan Keuangan Daerah yang memberikan dampak negative terhadap lingkungan hidup.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Sedangkan isu-isu strategis yang dihadapi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Kemampuan Keuangan Daerah

Belum optimalnya kapasitas fiskal daerah sebagai berikut :

- a. Rasio ketergantungan anggaran dari Pemerintah pusat masih tinggi tapi kemampuan mendanai semakin meningkat, Tahun 2021 = 0,29 sedangkan Tahun 2022 = 0,27;
- b. Rasio lancar pada Tahun 2022 sebesar 9,03 Hal ini berarti kemampuan membayar hutang sebesar 9,03 kali rasio ini semakin berkurang dengan sangat cepat dibanding kondisi tahun sebelumnya;
- c. Rasio belanja modal dari tahun 2021 ke tahun 2022 naik, 0,10 di Tahun 2021 menjadi 0,12 di Tahun 2022.

2. Kemampuan pengelolaan keuangan daerah

Kemampuan keuangan daerah sering dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah adalah rasio pendapatan asli daerah terhadap APBD, rasio PAD pada tahun 2022 adalah 0,23 lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 0,19.

3 Isu Kualitas Pelayanan Publik

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan meningkatnya partisipasi kelompok aktifis masyarakat di era keterbukaan informasi semakin tinggi. Berkembangnya sistem

monitoring berbasis komunitas dan maraknya jurnalisme warga meningkatkan tuntutan atas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, terjangkau, tepat guna, berkualitas, dan inklusif.

Berikut merupakan pelayanan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

1. Pelayanan Pajak Penerangan Jalan;
2. Pelayanan Pajak Restoran;
3. Pelayanan Pajak Hotel;
4. Pelayanan Pajak Hiburan;
5. Pelayanan Pajak Reklame;
6. Pelayanan Pajak Air Tanah;
7. Pelayanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
8. Pelayanan Pajak Parkir;
9. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
10. Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
11. Pelayanan penyelesaian permohonan Keberatan Wajib Pajak atas Penetapan Pajak Daerah ;
12. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
13. Peminjaman BPKB ;
14. Pelayanan Rekonsiliasi Data Belanja dan Pajak, Piutang serta Pendapatan;
15. Penyusunan KUA PPAS dan APBD.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan adalah kondisi ideal yang ingin dicapai pada waktu tertentu. Pada konteks Renstra ini, tujuan adalah target-target yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1-3 tahun diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan Tahun 2024-2026 adalah **“Meningkatkan Daya Saing Daerah”**

Adapun tujuan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah dan penyusunan kebijakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2024-2026 adalah **“Meningkatkan tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi”**

4.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan selama 3 (tiga) tahun mendatang. Sasaran penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah dan penyusunan kebijakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan BMD;
3. Optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar beserta indikatornya kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program	Indikator Program	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
						2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil Penilaian dari Inspektorat atas nilai SAKIP OPD	73	75	77
		Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan daerah dan	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang	% ketepatan	WTP	WTP	WTP

	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah	Rasio pajak daerah terhadap PAD	Program Pendapatan Daerah	51 %	51 %	52 %
			Bidang pendataan	2,2 %	2,2 %	2,2 %
			Bidang Penagihan	6,5 %	7 %	7,5 %
				% pertumbuhan WP baru		
				% pengurangan piutang		
				(jumlah piutang – pembayaran dan penghapusa)/jumlah piutang X 100		

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2023

Cascading Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar

- TUJUAN DAERAH

: Meningkatkan Daya Saing Daerah
- INDIKATOR

: Indeks Daya Saing Daerah
- SASARAN 4

: Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi
- INDIKATOR

: Indeks Reformasi Birokrasi
- TUJUAN OPD

: Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi

URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM		TARGET	
		(OUTCOME)		2024	2026
1	2	3		4	6
SASARAN 1	Meningkatnya Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD		73	77
Non Urusan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai Targetnya		100	100
SASARAN 2	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan BMD	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah		WTP	WTP

	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase ketepatan APBD, presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah dan presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku	100	100	100
	2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase OPD yang rekonsiliasi tepat waktu	100	100	100
SASARAN 3	Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PAD	51	51	52
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio pajak daerah terhadap PAD	51	51	52

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

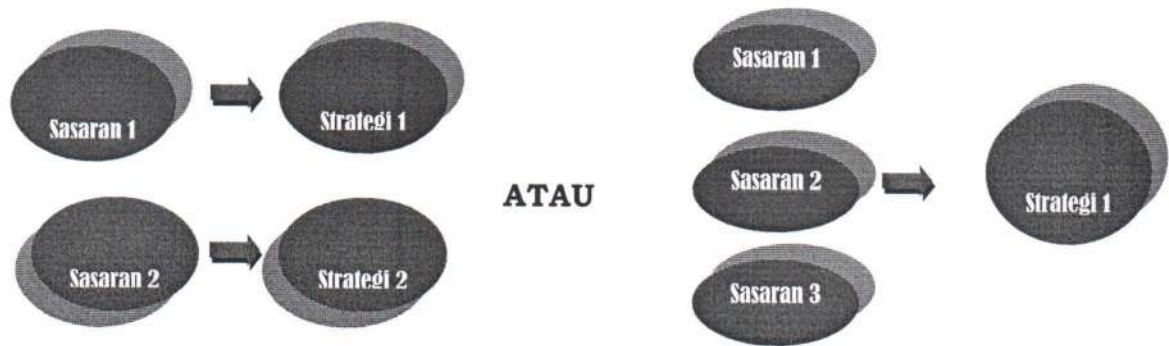
5.1 Strategi

Strategi merupakan suatu langkah dalam rangka memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun serta berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategis juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada konteks penyelenggaraan layanan oleh pemerintah daerah, strategi yang baik dikembangkan dengan prinsip-prinsip: (i) dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang; (ii) didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan; (iii) Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan (iv) Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Suatu strategi dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau kelompok sasaran dengan kerangka logis sebagaimana bagan berikut:

Gambar 5. 1 Keterkaitan Sasaran dengan Strategi



Berdasarkan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, maka strategi yang diambil dalam rangka mengimplementasikan agenda pembangunan selama 3 (tiga) tahun kedepan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan
- 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan BMD ;
- 3. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Tujuan, Sasaran dan Strategi yang diambil dalam rangka mengimplementasikan agenda pembangunan selama 3 (tiga) tahun kedepan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar yang sesuai ditunjukkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan Daerah : Meningkatkan Daya Saing Daerah
Sasaran Daerah : Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya	Meningkatkan	1. Meningkatkan	1. Peningkatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	kualitas tata laksana pemerintahan	kapasitas dan integritas pegawai 2. Meningkatkan pemenuhan pengelolaan dan pemanfaatan sarpras secara efektif dan efisien; 3. Meningkatkan tertib administrasi tata kelola perkantoran	pemahaman pegawai terhadap : • tugas dan fungsi; • dokumen perencanaan; • hak dan kewajiban pegawai 2. Peningkatan kualitas koordinasi Internal 3. Penyusunan standar operasional / prosedur pelayanan 4. Penyusunan dokumen anggaran yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan; 5. Pelaksanaan secara rutin monitoring dan evaluasi kegiatan OPD
	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan BMD	1. Meningkatkan kapasitas perencanaan; 2. Mengikuti setiap perkembangan dan informasi mengenai regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah melalui portal kementrian / lembaga maupun media lainnya;	1. Peningkatan pemahaman perencana OPD dalam melakukan perencanaan dan penganggaran; 2. Melakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah dan ketepatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3. Meningkatkan kapasitas intelektual dan kepribadian SDM pengelola keuangan daerah; 4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah; 5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Bimtek Online dan Off line (pusat dan daerah) didukung sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang professional; 6. Mewujudkan system aplikasi tata kelola keuangan daerah yang efektif; efisien dan <i>paperless</i> serta sesuai peraturan	waktu penyerahannya; 4. Pengembangan SDM melalui pelatihan dan pendidikan; 5. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kerja, baik perangkat keras maupun perangkat lunak; 6. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia; 7. Pembangunan dan penyempurnaan Aplikasi tata kelola keuangan sesuai tuntutan digitalisasi dan kebutuhan transaksi keuangan non tunai; 8. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. 9. Peningkatan pemahaman SDM pengurus barang terkait pengelolaan barang milik daerah; 10. Pelaksanaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		perundangan yang berlaku. 7. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia; 8. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien; 9. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;	rekonsiliasi setiap tribulan;
	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah	1. Meningkatkan koordinasi / konsultasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten / Kota lain; 2. Meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan bidang PKP didukung sarana	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kerja, baik perangkat keras maupun perangkat lunak; 2. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia; 3. Peningkatan frekuensi serta sosialisasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		dan prasarana yang memadai dan SDM yang professional; 3. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak; 4. Meningkatkan pemahaman, kesadarann dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan daerah; 5. Meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM melalui penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis perpajakan daerah; 6. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan pajak daerah dengan dukungan SDM, data yang akurat dan terpenuhinya sarana prasarana	tentang pajak daerah melalui berbagai media; 4. Peningkatan kegiatan sosialisasi dan publikasi dalam rangka meningkatkan pemahaman kesadaran dan kepatuhan WP terhadap kewajiban pajak daerah; 5. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dibidang PPP; 6. Mewujudkan pelayanan yang mudah dan cepat melalui pengembangan inovasi baik inovasi pada sistem informasi maupun inovasi pelayanan keliling jemput bola.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		yang memadai.	

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pengejawantahan dari strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran. Pada konteks penyelenggaraan pemerintah daerah, arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah kabupaten dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD Kabupaten Tahun 2024-2026. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu Perangkat Daerah juga wajib Menyusun Renstra Tahun 2024-2026. Renstra Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah, permasalahan dan isu strategis yang dihadapi, potensi dan kewenangan yang dimiliki, kemampuan pendanaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut diatas Renstra Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar disusun dengan memperhatikan tujuan, sasaran daerah, indikator dan target kinerja daerah, serta kemampuan dana daerah.

Berdasarkan strategi yang akan dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, maka arah kebijakan yang dapat diambil oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pemahaman pegawai terhadap : tugas dan fungsi, dokumen perencanaan, hak dan kewajiban pegawai
2. Peningkatan kualitas koordinasi Internal ;
3. Penyusunan standar operasional / prosedur pelayanan;
4. Penyusunan dokumen anggaran yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan;
5. Pelaksanaan secara rutin monitoring dan evaluasi kegiatan OPD;

6. Peningkatan pemahaman perencana OPD dalam melakukan perencanaan dan penganggaran;
7. Melakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah dan ketepatan waktu penyerahannya;
9. Pengembangan SDM melalui pelatihan dan pendidikan;
10. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kerja, baik perangkat keras maupun perangkat lunak;
11. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia;
12. Pembangunan dan penyempurnaan Aplikasi tata kelola keuangan sesuai tuntutan digitalisasi dan kebutuhan transaksi keuangan non tunai;
13. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.
14. Peningkatan pemahaman SDM pengurus barang terkait pengelolaan barang milik daerah;
15. Pelaksanaan rekonsiliasi setiap tribulan;
16. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kerja, baik perangkat keras maupun perangkat lunak;
17. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia;
18. Peningkatan frekuensi serta sosialisasi tentang pajak daerah melalui berbagai media;
19. Peningkatan kegiatan sosialisasi dan publikasi dalam rangka meningkatkan pemahaman kesadaran dan kepatuhan WP terhadap kewajiban pajak daerah;
20. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dibidang PPP;
21. Mewujudkan pelayanan yang mudah dan cepat melalui pengembangan inovasi, baik inovasi pada sistem informasi maupun inovasi pelayanan keliling jemput bola.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang ditetapkan sehingga sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat dicapai. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Untuk tahun 2024-2026 memiliki program baru sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 menjadi 4 (empat) program sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah;
2. Program pengelolaan keuangan daerah;
3. Program pengelolaan barang milik daerah;
4. Program pengelolaan pendapatan daerah.

Program-program tersebut dilaksanakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas, pokok, tata kerja, dan kewenangan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang merupakan program utama/ intimaupun program pendukung/program penunjang. Program utama atau inti adalah program yang dilaksanakan terkait secara langsung dalam pencapaian indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis sehingga tujuan akhir yang terkandung dalam visi dapat dicapai. Sedangkan program pendukung/penunjang adalah sebagai program operasional yang menunjang terlaksananya tugas, pokok, dan tata kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar yang

secara tidak langsung mendukung pencapaian target indikator kinerja dari sasaran strategis.

Program dan kegiatan, indikator kinerja beserta dana yang diperlukan disajikan pada Tabel 6.1 untuk tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 6.1 Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Target (6)	Rp (7)	Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									(14)	(15)
Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi														
		5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			360,359,580,500		411,834,888,000		383,722,842,813		1,155,917,311,313		
		5.02	KEUANGAN			360,359,580,500		411,834,888,000		383,722,842,813		1,155,917,311,313	BKD	Kab. Karanganyar
	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan				73	70,320,000,000	75	70,286,000,000	77	70,988,860,000	77	211,594,860,000	BKD	Kab. Karanganyar
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100	70,320,000,000	100	70,286,000,000	100	70,988,860,000	100	211,594,860,000	BKD	Kab. Karanganyar
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100	560,533,000	100	560,533,000	100	560,533,000	100	1,681,599,000	BKD	Kab. Karanganyar
		5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	369,964,000	8	369,964,000	8	369,964,000	8	1,109,892,000	BKD	Kab. Karanganyar

		5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	190,569,000	1	190,569,000	1	190,569,000	1	571,707,000	BKD	Kab. Karanganyar
		5.02.01.2.0002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100	25,120,876,000	100	25,086,876,000	100	25,529,736,000	100	75,737,488,000	BKD	Kab. Karanganyar
		5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68	25,090,165,000	68	25,056,165,000	68	25,488,912,000	68	75,635,242,000	BKD	Kab. Karanganyar
		5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	30,711,000	1	30,711,000	1	30,711,000	1	92,133,000	BKD	Kab. Karanganyar
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	687,405,000	100	687,405,000	100	907,405,000	100	2,282,215,000	BKD	Kab. Karanganyar
		5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	408	687,405,000	408	687,405,000	408	907,405,000	408	2,282,215,000	BKD	Kab. Karanganyar
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	3,630,147,000	100	3,630,147,000	100	3,670,147,000	100	10,930,441,000	BKD	Kab. Karanganyar
		5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	1,053,043,000	10	1,053,043,000	10	1,053,043,000	10	3,159,129,000	BKD	Kab. Karanganyar
		5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24	551,250,000	24	551,250,000	24	591,250,000	24	1,693,750,000	BKD	Kab. Karanganyar

5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	964,246,000	120	964,246,000	120	964,246,000	120	2,892,738,000	BKD	Kab. Karanganyar
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	21796	210,886,000	21796	210,886,000	21796	210,886,000	21796	632,658,000	BKD	Kab. Karanganyar
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10	850,722,000	10	850,722,000	10	850,722,000	10	2,552,166,000	BKD	Kab. Karanganyar
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	273,000,000	100	273,000,000	100	273,000,000	100	819,000,000	BKD	Kab. Karanganyar
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	273,000,000	1	273,000,000	1	273,000,000	1	819,000,000	BKD	Kab. Karanganyar
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	38,555,216,000	100	38,555,216,000	100	38,555,216,000	100	115,665,648,000	BKD	Kab. Karanganyar
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	230,385,000	12	230,385,000	2	230,385,000	2	691,155,000	BKD	Kab. Karanganyar
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	37,605,978,000	12	37,605,978,000	12	37,605,978,000	12	112,817,934,000	BKD	Kab. Karanganyar
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	105,000,000	1	105,000,000	1	105,000,000	1	315,000,000	BKD	Kab. Karanganyar
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	613,853,000	12	613,853,000	12	613,853,000	12	1,841,559,000	BKD	Kab. Karanganyar

	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan daerah	100	1,492,823,000	100	1,492,823,000	100	1,492,823,000	100	4,478,469,000	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	78	524,500,000	78	524,500,000	78	524,500,000	78	1,573,500,000	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	133, 158, & 92	403,936,000	133, 158, & 92	403,936,000	133, 158, & 92	403,936,000	133, 158, & 92	1,211,808,000	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	219,987,000	1	219,987,000	1	219,987,000	1	659,961,000	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	210,000,000	1	210,000,000	1	210,000,000	1	630,000,000	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	134,400,000	10	134,400,000	10	134,400,000	10	403,200,000	BKD	Kab. Karanganyar
				WTP	282,957,031,400	WTP	334,277,471,000	WTP	305,536,844,813	WTP	922,771,347,213	BKD	Kab. Karanganyar
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan													

pengelolaan BMD	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Presentase ketepatan APBD, presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah dan presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku	100	282,957,031,400	100	334,277,471,000	100	305,536,844,813	100	922,771,347,213	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Presentase ketepatan APBD	100	1,591,727,000	100	1,792,497,800	100	1,851,871,613	100	5,236,096,413	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	5	264,233,000	5	364,233,000	5	364,233,000	5	992,699,000	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4	97,732,000	4	98,502,800	4	98,502,800	4	294,737,600	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	42	28,365,000	42	28,365,000	42	28,365,000	42	85,095,000	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	42	24,788,000	42	24,788,000	42	24,788,000	42	74,364,000	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	42	35,805,000	42	35,805,000	42	35,805,000	42	107,415,000	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikas	42	37,110,000	42	37,110,000	42	37,110,000	42	111,330,000	BKD	Kab. Karanganyar

	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3	280,440,000	3	380,440,000	3	439,813,813	3	1,100,693,813	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3	259,235,000	3	259,235,000	3	259,235,000	3	777,705,000	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2	96,530,000	2	96,530,000	2	96,530,000	2	289,590,000	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4	467,489,000	4	467,489,000	4	467,489,000	4	1,402,467,000	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	presentase ketepatan kelengkapan proses pencapaian sesuai ketentuan yang berlaku	100	1,058,926,000	100	1,258,926,000	100	1,258,926,000	100	3,576,778,000	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	84	17,483,000	84	17,483,000	84	17,483,000	84	52,449,000	BKD	Kab. Karanganyar

5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan transfer lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12	6,593,000	12	6,593,000	12	6,593,000	12	19,779,000	BKD	Kab. Karanganyar
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non-tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12	7,118,000	12	7,118,000	12	7,118,000	12	21,354,000	BKD	Kab. Karanganyar
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kasda laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12	600,430,000	12	800,430,000	12	800,430,000	12	2,201,290,000	BKD	Kab. Karanganyar

	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	4	4,778,000	4	4,778,000	4	4,778,000	4	14,334,000	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan SP2D dengan Instansi Terkait	12	168,000,000	12	168,000,000	12	168,000,000	12	504,000,000	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	9,113,000	1	9,113,000	1	9,113,000	1	27,339,000	BKD	Kab. Karanganyar

5.02.02.2.02.0011	Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100	245,411,000	100	245,411,000	100	245,411,000	100	736,233,000	BKD	Kab. Karanganyar
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah	100	1,588,630,000	100	1,648,630,000	100	1,648,630,000	100	4,885,890,000	BKD	Kab. Karanganyar
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	16	49,944,000	16	109,944,000	16	109,944,000	16	269,832,000	BKD	Kab. Karanganyar
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	1	16,058,000	1	16,058,000	1	16,058,000	1	48,174,000	BKD	Kab. Karanganyar

	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6	818,864,000	6	818,864,000	6	818,864,000	6	2,456,592,000	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	52,693,000	1	52,693,000	1	52,693,000	1	158,079,000	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	122,380,000	1	122,380,000	1	122,380,000	1	367,140,000	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemda	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	34,781,000	1	34,781,000	1	34,781,000	1	104,343,000	BKD	Kab. Karanganyar

	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	90	493,910,000	90	493,910,000	90	493,910,000	1,481,730,000	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertib dan Akuntabel	-	278,717,748,400	-	329,577,417,200	-	300,777,417,200	909,072,582,800	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.02.2.04.0004	Analisis perencanaan dan Penyaluran bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1	260,140,331,200	1	301,000,000,000	1	278,200,000,000	839,340,331,200	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	5,000,000,000	1	9,000,000,000	1	7,000,000,000	21,000,000,000	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1	13,577,417,200	1	19,577,417,200	1	15,577,417,200	48,732,251,600	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase OPD yang rekonsiliasi tepat waktu	100	2,229,179,400	100	2,288,624,000	100	2,114,689,000	6,632,492,400	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertiba dan Akuntabel	100	2,229,179,400	100	2,288,624,000	100	2,114,689,000	6,632,492,400	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	48,345,000	1	48,345,000	1	48,345,000	145,035,000	BKD	Kab. Karanganyar

5.02.03.2.01.0005	Pentastusahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penastusahaan Barang Milik Daerah	2	106,655,000	2	106,655,000	2	319,965,000	BKD	Kab. Karanganyar
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12	191,867,400	12	191,867,400	12	575,602,200	BKD	Kab. Karanganyar
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12	1,200,000,000	12	1,100,000,000	12	3,500,000,000	BKD	Kab. Karanganyar
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemantataan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemantataan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12	371,236,000	12	430,680,600	12	1,173,152,600	BKD	Kab. Karanganyar
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6	87,593,000	6	87,593,000	6	262,779,000	BKD	Kab. Karanganyar
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	90	223,483,000	90	223,483,000	90	655,958,600	BKD	Kab. Karanganyar

Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan daerah			Rasio pajak daerah terhadap PAD	51	4,853,369,700	51	4,982,793,000	52	5,082,449,000	52	14,918,611,700	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Tertib	100	4,853,369,700	100	4,982,793,000	100	5,082,449,000	100	14,918,611,700	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	100	4,853,369,700	100	4,982,793,000	100	5,082,449,000	100	14,918,611,700	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2	330,000,000	2	330,000,000	2	330,000,000	2	990,000,000	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1	65,970,700	1	65,970,700	1	65,970,700	1	197,912,100	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	450000	1,100,000,000	450000	1,229,423,300	450000	1,300,000,000	450000	3,629,423,300	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Peneltitan dan Verifikasi	504000	1,200,000,000	504000	1,200,000,000	504000	1,229,079,300	504000	3,629,079,300	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	108	131,250,000	108	131,250,000	108	131,250,000	108	393,750,000	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	504000	1,262,000,000	504000	1,262,000,000	504000	1,262,000,000	504000	3,786,000,000	BKD	Kab. Karanganyar

	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	50	21,000,000	50	21,000,000	50	21,000,000	50	21,000,000	63,000,000	BKD	Kab. Karanganyar
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak daerah	Telaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5040 00	743,149,000	5040 00	743,149,000	504 000	743,149,000	50400 0	743,149,000	2,229,447,000	BKD	Kab. Karanganyar

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan, sasaran atau kegiatan. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Berikut ditampilkan indikator kinerja Baperlitbang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada.

Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap

pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi(*ex-post*). Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau ketidakberhasilan) kebijakan/program/kegiatan dan pada akhirnya sulit juga untuk menilai kinerja instansi unit kerja pelaksanaanya.

Instansi pemerintah belum disebut berkinerja sebelum dapat menunjukkan keberhasilan pencapaian *outcome*, *benefit* maupun *impact*-nya. Namun demikian, *outcome*, *benefit* maupun *impact* mungkin baru bisa dicapai setelah beberapa tahun kemudian. Sehingga instansi pemerintah mungkin baru benar-benar bisa menunjukkan keberhasilan kinerjanya setelah beberapa tahun kemudian. Untuk hal seperti ini, instansi pemerintah harus mampu menunjukkan hubungan antara *output-output* dan aktivitas yang telah dikerjakan setiap tahunnya dengan kinerja yang baru akan diperoleh di masa yang akan datang. Kapan kinerja tersebut dapat dicapai juga sudah harus direncanakan sejak awal. Apabila hal tersebut telah dipenuhi, instansi pemerintah tersebut telah dapat menyatakan output dan kegiatan tahunannya sebagai kinerja sementara dalam rangka mencapai kinerja sesungguhnya beberapa tahun kemudian.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM Daerah dapat dicapai. Indikator kinerja daerah ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu indikator capaian kinerja program atau lebih dari satu indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah yang bersangkutan.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundangan dan bertanggungjawab maka dilakukan

audit keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Penetapan indikator kinerja Badan Keuangan Daerah selanjutnya disajikan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	TARGET			SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026		
Tujuan								
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	Hasil Penilaian dari Kementerian PAN RB	65	67	70	Hasil Penilaian dari Kementerian PAN RB	
Sasaran								
1. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	Hasil Penilaian dari Inspektorat atas nilai SAKIP OPD	73	75	77	Rekapitulasi capaian indikator sasaran dan program	Sekretariat
2. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan BMD	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Opini	Hasil penilaian dari BPK	WTP	WTP	WTP	Hasil Pemeriksaan BPK	
	Presentase ketepatan APBD	%	Presentase ketepatan APBD	100	100	100	RKA PD, APBD	Bidang Anggaran
	Presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah	%	Jumlah LK OPD yang sesuai dan tepat waktu dibagi jumlah OPD dikali 100%	100	100	100	Laporan Keuangan	Bidang Akuntansi

3. Optimalisasi Sumber-sumber Pendaptan Daerah	Presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku	%	Ketepatan kelengkapan proses pencairan sesuai ketentuan yang berlaku dikali 100%	100	100	100	SPP, SPM, SP2D	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
	Presentase OPD yang rekonsiliasi tepat waktu	%	Jumlah rekonsiliasi BMD OPD dibagi jumlah OPD dikali 100 %	100	100	100	SIMDA BMD	Bidang Aset
	Rasio Pajak Daerah terhadap PAD	%	Pajak Daerah dibagi PAD dikali 100%	51	51	52	Realisasi Pajak Daerah terhadap PAD	
	Presentase pertumbuhan WP baru	%	Jumlah penambahan WP / Jumlah WP dikali 100%	2,2	2,2	2,2	Pertumbuhan WP Baru	Bidang PPP
	Presentase pengurangan piutang	%	(Jumlah piutang – pembayaran dan penghapusan) / jumlah piutang x 100 %	6,5	7	7,5	Jumlah Piutang yang dihapus	Bidang PKP

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dimaksud sebagai dokumen perencanaan strategis Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar yang merupakan penajaman program Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar dan diharapkan mampu mengerahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

Dokumen Renstra ini merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar.

Renstra Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 merupakan Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dimana Pemerintah Daerah yang masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2023 untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah kabupaten dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD kabupaten Tahun 2024-2026. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu Perangkat Daerah juga wajib Menyusun Renstra Tahun 2024-2026. Renstra Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah, permasalahan dan isu strategis yang dihadapi, potensi dan

kewenangan yang dimiliki, kemampuan pendanaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut diatas Renstra Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar disusun dengan memperhatikan tujuan, sasaran daerah, indikator dan target kinerja daerah, serta kemampuan dana daerah.

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar tahun 2024-2026 merupakan hasil koordinasi perencanaan dari masing-masing bidang secara aspiratif, sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel yang diharapkan akan terjadi konsistensi dan sinkronisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara nyata.

8.2 Kaidah Pelaksanaan Renstra

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar perlu menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan;
3. Renstra Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah kebijakan bagi ASN Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas pelaksana pemerintahan dan pembangunan daerah dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan.

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

